

## ABSTRAKSI

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, pemerintah daerah dituntut untuk semakin aktif dalam menggali sumber pembiayaan pembangunan di daerahnya sendiri. Hal ini untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah adalah Dana Bagi Hasil penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di masa mendatang semakin penting dalam menunjang penerimaan daerah. Semakin besar penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di suatu daerah maka semakin besar pula bagi hasil yang diterima oleh daerah itu sendiri.

Kota Semarang adalah salah satu daerah yang berpotensi dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hal ini dikarenakan Kota Semarang mempunyai jumlah penduduk yang besar dan kegiatan perekonomian yang tinggi. Fakta menunjukkan bahwa sejak tahun 2001 (tahun pertama berlakunya otonomi daerah) dana bagi hasil penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Kota Semarang berperan penting dalam struktur Pendapatan Daerah.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh jumlah wajib pajak orang pribadi dan produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Kota Semarang dengan menggunakan jenis lapangan usaha sebagai variabel *dummy*-nya. Faktor-faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Orang Pribadi Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode data panel, *Least Square Dummy Variable* (LSDV), yang hasilnya akan diuji dengan kriteria teori, statistik, dan ekonometrika. Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Terdapat perbedaan antar lapangan usaha dalam mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Kota Semarang.
2. Jumlah wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Orang Pribadi Kota Semarang.
3. PDRB berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Orang Pribadi Kota Semarang.

Dari hasil penelitian ini ada beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan, yaitu:

1. Kerjasama antara pemerintah Kota Semarang dengan Direktorat Jenderal Pajak perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pertukaran data (*data interchange*).
2. Kebijakan pemerintah Kota Semarang perlu memperhatikan kebijakan yang dapat menunjang dan mendorong pertumbuhan ekonomi terutama kebijakan yang mengarah pada sektor-sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

## DAFTAR ISI

	Halaman	
HALAMAN JUDUL	i	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii	
HALAMAN PERNYATAAN	iii	
ABSTRACT	vii	
ABSTRAKSI	viii	
KATA PENGANTAR	iii	
DAFTAR TABEL	v	
DAFTAR GAMBAR	vi	
DAFTAR LAMPIRAN	vii	
I	PENDAHULUAN	
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Rumusan Masalah	7
1.3.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
II	TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS	
2.1.	Pengertian Pajak	9
2.2.	Fungsi Pajak	10
2.3.	Prinsip Pengenaan Pajak	13
2.4.	Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung	15
2.5.	Pajak Progresif, Pajak Proporsional, dan Pajak Regresif	16
2.6.	Pajak Penghasilan	18

2.6.1.	Subjek Pajak	18
2.6.2.	Objek Pajak	19
2.6.3.	Basis Pajak dan Penghasilan Kena Pajak	22
2.6.4.	Tarif Pajak	22
2.7.	Jumlah Wajib Pajak	24
2.8.	Produk Domestik Regional Bruto	25
2.9.	Penelitian-penelitian Terdahulu	28
2.10.	Kerangka Pemikiran Teoritis	32
2.11.	Hipotesis	33
III	METODE PENELITIAN	
3.1.	Definisi Operasional Variabel	35
3.2.	Jenis dan Sumber Data	37
3.3.	Teknik dan Alat Analisis	38
3.4.	Pengujian Hipotesis	40
3.4.1	Pengujian Teoritis	40
3.4.2	Pengujian Statistik	40
3.4.3	Pengujian Penyimpangan Asumsi Klasik	42
IV	GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG	
4.1.	Letak Geografis dan Batas Wilayah	45
4.2.	Luas Wilayah	45
4.3.	Kependudukan	47
4.4.	Keuangan	48
4.5.	Pertumbuhan Ekonomi	50

V	HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1.	Hasil Pengujian Data	53
5.1.1	Pengujian Teoritis	54
5.1.2	Pengujian Statistik	55
5.1.3	Pengujian Ekonometrika	56
5.1.4	Ringkasan Hasil Pengujian	59
5.2.	Interpretasi Model	59
5.3.	Analisis Deskriptif	61
5.3.1	Penerimaan PPh Orang Pribadi	62
5.3.2	Wajib Pajak Orang Pribadi	65
5.3.3	Produk Domestik Regional Bruto	70
5.3.4	Hubungan Antara Penerimaan PPh Orang Pribadi Dengan Wajib Pajak Orang Pribadi dan PDRB	71
VI	PENUTUP	
6.1.	Kesimpulan	73
6.2.	Saran	73
6.3.	Limitasi	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan nasional, yang tercermin dalam rencana pembangunan jangka panjang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan tersebut, sebagaimana di negara yang sedang berkembang (*developing countries*) lainnya, mengalami pasang surut dalam pertumbuhan ekonominya. Oleh karena itu pembangunan harus diselenggarakan secara berkelanjutan dan terencana dalam segala bidang. Pembangunan dilaksanakan melalui serangkaian investasi yang memerlukan dukungan dana yang tersedia secara berkelanjutan pula.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaiki dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, setiap daerah berhak mengelola pemerintahan dan keuangan sendiri tanpa banyak tergantung pada pemerintah pusat. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam menggali lebih banyak potensi perekonomian di daerahnya serta memainkan peranan yang lebih besar dalam merangsang aktifitas ekonomi daerah.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional, kinerja perekonomian Jawa Tengah selama 2001-2004 (otonomi daerah mulai berlaku tahun 2001) cenderung mengalami peningkatan, sebagaimana tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Tabel 1.1 di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**PDRB Provinsi Jawa Tengah**  
**Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Juta Rupiah)**  
**Tahun 2001 – 2004**

<b>Tahun</b>	<b>PDRB</b>	<b>Laju Pertumbuhan (%)</b>
2001	118.816.400	3,59
2002	123.038.541	3,55
2003	129.166.462	4,98
2004	135.789.872	5,13

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Jawa Tengah Dalam Angka, 2005*

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi dari 3,59% pada tahun 2001 menjadi 5,13% pada tahun 2004. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tersebut tentunya tidak terlepas dari peran daerah Kabupaten/Kota dalam menggerakkan roda perekonomian di wilayahnya masing-masing.

Secara rinci PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2001-2004 dapat dilihat pada Tabel 1.2.

**Tabel 1.2**  
**PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah**  
**Tahun 2001-2004 (Dalam Ribuan Rupiah)**

No.	Wilayah	PDRB				Pertumbuhan (%)		
		2001	2002	2003	2004	2001-2002	2002-2003	2003-2004
	<b>Kabupaten:</b>							
1	Cilacap	16.483.552	17.963.442	19.141.986	20.458.739	8,98	6,56	6,88
2	Banyumas	2.689.577	2.777.619	2.910.478	3.027.430	3,27	4,78	4,02
3	Purbalingga	1.485.367	1.533.382	1.601.792	1.665.739	3,23	4,46	3,99
4	Banjarnegara	2.047.938	2.067.306	2.128.163	2.209.397	0,95	2,94	3,82
5	Kebumen	1.961.244	2.024.774	2.099.743	2.141.060	3,24	3,70	1,97
6	Purworejo	1.955.371	2.022.743	2.125.411	2.214.137	3,45	5,08	4,17
7	Wonosobo	1.374.944	1.402.299	1.434.155	1.466.975	1,99	2,27	2,29
8	Magelang	2.732.031	2.857.339	2.992.408	3.120.319	4,59	4,73	4,27
9	Boyolali	2.984.958	3.062.388	3.211.153	3.276.631	2,59	4,86	2,04
10	Klaten	3.267.193	3.394.958	3.561.706	3.737.994	3,91	4,91	4,95
11	Sukoharjo	2.934.260	3.024.685	3.149.996	3.285.605	3,08	4,14	4,31
12	Wonogiri	2.214.251	2.294.458	2.333.138	2.410.434	3,62	1,69	3,31
13	Karanganyar	3.190.291	3.333.969	3.522.990	3.762.025	4,50	5,67	6,79
14	Sragen	1.988.134	2.035.585	2.109.239	2.206.331	2,39	3,62	4,60
15	Grobogan	1.960.212	2.024.044	2.115.140	2.190.406	3,26	4,50	3,56
16	Blora	1.666.104	1.706.776	1.789.418	1.869.108	2,44	4,84	4,45
17	Rembang	1.398.059	1.479.082	1.525.177	1.584.429	5,80	3,12	3,88
18	Pati	3.051.143	3.136.065	3.202.772	3.334.916	2,78	2,13	4,13
19	Kudus	7.854.877	8.048.851	8.184.393	8.449.294	2,47	1,68	3,24
20	Jejara	2.877.654	2.990.539	3.105.547	3.222.872	3,92	3,85	3,78
21	Demak	2.358.228	2.421.373	2.490.414	2.575.195	2,68	2,85	3,40
22	Semarang	3.406.953	3.773.973	3.662.184	3.703.507	10,77	(2,96)	1,13
23	Temanggung	1.837.400	1.899.508	1.985.295	2.058.605	3,38	4,52	3,69
24	Kendal	3.757.955	3.879.301	3.992.278	4.104.227	3,23	2,91	2,80
25	Batang	1.782.267	1.817.972	1.856.899	1.894.108	2,00	2,14	2,00
26	Pekalongan	2.255.089	2.320.647	2.406.191	2.504.933	2,91	3,69	4,10
27	Pemalang	2.502.609	2.587.215	2.685.677	2.791.400	3,38	3,81	3,94
28	Tegal	2.289.461	2.408.300	2.542.121	2.677.090	5,19	5,56	5,31
29	Brebes	3.567.516	3.751.725	3.930.501	4.119.446	5,16	4,77	4,81
	<b>Kota:</b>							
30	Magelang	759.504	782.362	811.632	835.953	3,01	3,74	3,00
31	Surakarta	3.113.669	3.268.560	3.468.277	3.669.373	4,97	6,11	5,80
32	Salatiga	653.798	679.184	714.424	736.767	3,88	5,19	3,13
33	Semarang	14.456.106	15.243.443	15.991.486	16.690.914	5,45	4,91	4,37
34	Pekalongan	1.381.288	1.425.719	1.479.611	1.550.654	3,22	3,78	4,80
35	Tegal	746.860	784.892	825.672	877.287	5,09	5,20	6,25

Sumber: BPS Propinsi Jawa Tengah, *Jawa Tengah Dalam Angka, 2005(diolah)*

Berdasarkan Tabel 1.2 terlihat bahwa selama tahun 2001-2004 untuk tingkat Kabupaten laju pertumbuhan ekonomi tertinggi setiap tahunnya dicapai oleh Kabupaten Cilacap. Sedangkan untuk tingkat Kota laju pertumbuhan ekonomi tertinggi setiap tahunnya dicapai oleh Kota Semarang.

Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang relatif lebih tinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Tengah. Hal ini dapat dipahami karena Kota Semarang sebagai ibukota Propinsi Jawa Tengah yang kegiatan produksi dan konsumsinya relatif lebih besar daripada Kabupaten/Kota lainnya.

Kinerja perekonomian Kota Semarang tersebut tidak terlepas dari pendapatan daerah yang diterimanya. Mardiasmo (2002) berpendapat bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan kepada publik dan melaksanakan program pembangunan.

Salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi daerah adalah Dana Perimbangan. Sampai saat ini sebagian besar daerah kabupaten/kota di Indonesia penerimaan terbesar berasal dari penerimaan dana perimbangan. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat masih tinggi (Ismail, 2006). Temuan Kuncoro (2003), menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal kabupaten/kota di seluruh Jawa Tengah (termasuk Kota Semarang) terhadap pusat juga masih tinggi. Pada tahun 1999/2000-2001 derajat desentralisasi fiskal seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah kurang dari 20%. Mengingat peranan PAD dalam APBD selama ini

masih kurang signifikan, maka ke depan diperkirakan dana perimbangan masih menjadi tumpuan terakhir sumber penerimaan daerah.

Salah satu unsur dana perimbangan yang penting bagi daerah adalah dana bagi hasil penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku mulai tahun 2001. Menurut Loehr, *et.al* (1998) pajak penghasilan perseorangan merupakan salah satu jenis pajak yang terbaik (selain Pajak Bumi dan Bangunan) untuk bagi hasil penerimaan daerah. Hal ini dikarenakan pajak penghasilan perseorangan terkait erat dengan kegiatan perekonomian daerah yang dapat memperkuat basis pendapatan.

Sejalan dengan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kelonggaran dalam mengoptimalkan bagi hasil dari penerimaan PPh Orang Pribadi. Ini mengingat komponen Dana Perimbangan seperti DAU dan DAK besarnya ditentukan oleh pemerintah pusat melalui persyaratan yang ketat. Sedangkan penerimaan PBB, BPHTB, dan SDA didasarkan pada objek serta kondisi geografis yang terbatas.

Pada Tabel 1.3 terlihat peranan dana bagi hasil PPh Orang Pribadi terhadap total dana bagi hasil untuk Kota Semarang periode 2001-2004 masih sangat kecil. Yang menarik perhatian adalah porsi dana bagi hasil PPh Orang Pribadi terhadap total dana bagi hasil cenderung meningkat. Di lain pihak, porsi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) cenderung menurun. Padahal kedua jenis pajak terakhir ini lebih dahulu diberlakukan. Rata-rata pertumbuhan dana bagi hasil PPh Orang Pribadi (54%) per



tahun lebih tinggi daripada PBB dan BPHTB (21% dan 49%). Ini menunjukkan di masa akan datang peranan PPh Orang Pribadi semakin besar. Kenaikan penerimaan PPh Orang Pribadi ini akan berdampak pada kenaikan dana bagi hasil PPh Orang Pribadi di Kota Semarang.

Berdasarkan gambaran tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kota Semarang maupun pusat mempunyai kepentingan yang sama dalam menghimpun penerimaan PPh orang pribadi di Kota Semarang secara optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pengamatan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh orang pribadi untuk Kota Semarang.

Sesuai dengan teori dan hasil penelitian empiris Delis dan Handoko (1996), Yurzal dan Makhfatih (2000), Soemarso (1998), Departemen Keuangan RI (2000), Sobel dan Holcombe (1996), Veronika (2004), Masrofi (2004), Sasana (2005), dan Muchlis (2002) bahwa penerimaan pajak termasuk di dalamnya PPh Orang Pribadi akan terus meningkat yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi dan jumlah wajib pajak.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Pada era otonomi daerah yang mulai dilaksanakan tahun 2001, setiap daerah memasuki era baru dalam penataan sistem pemerintahan dan sistem perekonomian. Dengan otonomi daerah diharapkan peran daerah dalam mendukung perekonomian nasional menjadi semakin besar. Oleh karena itu diperlukan sumber dana pembangunan yang besar dalam menunjang peranan daerah tersebut. Salah satu

sumber dana pembangunan di daerah yang penting berasal dari dana bagi hasil PPh Orang Pribadi. Penerimaan PPh Orang Pribadi merupakan penerimaan yang sangat potensial untuk Kota Semarang. Laju pertumbuhan PPh Orang Pribadi Kota Semarang itu sendiri tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam PDRB dan pertumbuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **Wajib Pajak Orang Pribadi dan PDRB diduga berpengaruh terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi Kota Semarang.**

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi Kota Semarang.
2. Menganalisis pengaruh PDRB terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi Kota Semarang.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk:

1. Memberikan bahan pertimbangan dan sumbang saran bagi pemerintah daerah dan pusat dalam mengelola PPh Orang Pribadi.
2. Menambah khasanah dalam ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan.
3. Bahan penelitian lebih lanjut dari keterbatasan penelitian ini.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pengertian Pajak**

Penerimaan pemerintah terbesar diperoleh dari hasil pemungutan pajak. Menurut Mangkoesoebroto (2003) pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, yang didasarkan pada Undang-undang, dapat dipaksakan kepada subjek pajak, dan tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya. Musgrave (2003) secara tegas menyatakan bahwa pajak dan pungutan ditarik dari sektor swasta tanpa mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi pemerintah terhadap pihak pembayar.

Soemitro (2001) juga menegaskan bahwa dari segi makro ekonomi pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah, berdasarkan peraturan-peraturan yang dapat dipaksakan dan mengurangi *income* anggota masyarakat, tanpa memperoleh imbalan yang secara langsung tetapi sebaliknya pajak merupakan *income* bagi masyarakat yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran masyarakat/negara.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat diambil kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu :

Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang yang bersifat memaksa bagi warganya.

Pajak yang dibayar tidak diberikan kontraprestasi secara langsung bagi pembayar pajak.

Pajak dipungut dari masyarakat dan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan.

## **2.2 Fungsi Pajak**

Pada dasarnya pajak mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi *budgetair* dan regulator. Sebagai fungsi *budgetair*, pajak merupakan alat untuk mengumpulkan dana melalui Kas Negara bagi pembiayaan pembangunan. Pemerintah sangat mengharapkan penerimaan pajak selalu meningkat karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama. Di samping itu pengeluaran pemerintah setiap tahunnya meningkat sejalan dengan makin meningkatnya pula kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Adolf Wagner sebagai “*Law of Ever Increasing State*”, yaitu hukum tentang selalu meningkatnya kegiatan pemerintah (Suparmoko, 2004).

Pada fungsi regulator, pajak dimaksudkan untuk mengatur perekonomian yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Artinya, pajak dapat digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk menjalankan peranannya. Peranan pemerintah dalam arti luas adalah mengatur kegiatan-kegiatan produsen dan konsumen mencapai tujuan masing-masing.

Untuk dapat membiayai pembangunan, pemerintah dapat mengenakan berbagai jenis pajak kepada masyarakat. Suatu cara yang sangat membantu dalam membedakan berbagai jenis pajak tersebut adalah dengan memperhatikan titik-titik pembebanan di dalam arus sirkuler pendapatan dan pengeluaran dalam perekonomian sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.1 halaman 16.

Pada Gambar 2.1 terlihat bahwa pendapatan (1) diterima oleh rumah tangga dan dibagi menjadi pengeluaran konsumsi (2) dan tabungan (3). Pengeluaran konsumsi mengalir ke pasar barang konsumen dan menjadi penerimaan (4) perusahaan yang menjual barang. Tabungan mengalir melalui pasar modal dan disalurkan menjadi investasi (5). Selanjutnya akan menjadi pengeluaran di pasar barang-barang modal dan berubah menjadi penerimaan (6) perusahaan penghasil barang modal. Penerimaan sektor usaha bruto (7) dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai pengeluaran (8). Sebagian disisihkan untuk menutupi penyusutan (9) dan sisanya (10) digunakan untuk membayar tenaga kerja dalam bentuk upah dan gaji (11), membayar jasa modal dalam bentuk laba dan bunga (12), dan input-input lainnya di pasar faktor produksi.

Dalam Gambar 2.1 pajak dapat dikenakan terhadap pendapatan rumah tangga pada titik 1, terhadap pengeluaran konsumen pada titik 2, terhadap penerimaan perusahaan dari penjualan eceran atau nilai tambah pada titik 4, terhadap penerimaan total bruto perusahaan pada titik 7, terhadap penerimaan perusahaan neto setelah

dikurangi biaya penyusutan pada titik 10, terhadap upah dan gaji pada titik 11,  
terhadap laba pada titik 12, terhadap penerimaan tanggungan karyawan pada titik 13,

terhadap laba yang ditahan pada titik 15, atau terhadap pendapatan modal pada titik 14.

Pajak-pajak yang paling pokok dalam sistem perpajakan di Indonesia adalah pajak penghasilan orang pribadi pada titik 1, pajak penghasilan badan pada titik 12, pajak pertambahan nilai pada titik 4, dan pajak karyawan pada titik 11 dan 13.

### **2.3 Prinsip Pengenaan Pajak**

Stiglitz (2000) berpendapat bahwa dalam pemungutan pajak hendaknya memperhatikan lima karakteristik kelayakan, yaitu:

- a. *Efficiency*, sistem perpajakan hendaknya tidak menimbulkan distorsi, sebisa mungkin dapat menaikkan efisiensi ekonomi;
- b. *Administrative simplicity*, biaya administrasi dan kepatuhan dalam pemungutan pajak hendaknya rendah;
- c. *Flexibility*, sistem perpajakan harus mudah mengikuti perkembangan jaman;
- d. *Political responsibility*, sistem perpajakan harus transparan;
- e. *Fairness*, beban pajak hendaknya disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak.

Sedangkan menurut Musgrave dan Musgrave (2003) suatu sistem pajak yang baik haruslah memenuhi beberapa kriteria, sebagai berikut:

- a. Penerimaan/pendapatan harus ditentukan dengan tepat;
- b. Distribusi beban pajak harus adil. Setiap orang harus dikenakan pembayaran "sesuai dengan kemampuannya";

- c. Yang menjadi masalah penting adalah bukan hanya pada titik-titik mana pajak harus dibebankan, tetapi oleh siapa pajak tersebut pada akhirnya ditanggung.
- d. Pajak harus dipilih sedemikian rupa untuk meminimumkan terhadap keputusan perekonomian, dalam hubungannya dengan pasar yang efisien;
- e. Struktur pajak harus memudahkan penggunaan kebijakan fiskal untuk mencapai stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi;
- f. Sistem pajak harus menerapkan administrasi yang wajar dan tegas/pasti serta harus dapat dipahami oleh wajib pajak.
- g. Biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya harus serendah mungkin jika dibandingkan dengan tujuan-tujuan lain.

Hyman (1999) juga berpendapat bahwa dalam praktik pemungutan pajak perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. *Tax efficiency*, pengenaan pajak yang berlebihan dapat menurunkan semangat kerja individu;
- b. *Tax equity*, pengenaan pajak harus memenuhi kriteria *ability to pay* (semakin besar pendapatan semakin besar pula pajak yang harus dibayar).
- c. *Tax shifting*, untuk efisiensi pajak Pemerintah dapat melakukan penggeseran beban pajak kepada konsumen maupun produsen.
- d. *Revenue elasticity*, yang dapat dimanfaatkan untuk mengukur pengenaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi, apabila nilai *revenue elasticity* lebih kecil dari 1 maka dapat dikatakan pajak tersebut efektif.

Pertumbuhan pajak itu sendiri tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi. Choudry (dalam Delis dan Handoko, 1996) menyatakan ada dua kategori

pertumbuhan pajak yang didasarkan atas penyebab utamanya yaitu pertumbuhan otomatis yang penyebab utamanya adalah pendapatan per kapita. Pertumbuhan pajak yang kedua disebut diskresioner yang disebabkan adanya perubahan kebijakan perpajakan.

#### **2.4 Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung**

Menurut Suparmoko (2004) pajak langsung adalah pajak yang dikenakan berdasarkan surat ketetapan pajak dan pengenaannya dilakukan secara berkala, misalnya tahunan. Ditinjau dari aspek ekonomi, pajak langsung merupakan pajak yang beban pajaknya tidak dapat digeserkan kepada orang lain. Yang termasuk jenis pajak ini adalah pajak penghasilan (PPh) dan pajak bumi dan bangunan (PBB). Pajak tidak langsung adalah pajak yang pemungutannya selalu dikaitkan dengan terdapatnya suatu tindakan ataupun kejadian. Pajak tidak langsung beban pajaknya dapat dilimpahkan kepada orang lain. Yang termasuk jenis pajak ini adalah pajak pertambahan nilai (PPN), bea masuk, cukai, dan lainnya.

Di negara berkembang dengan tingkat pendapatan per kapita yang rendah, penerimaan pajak tidak langsung menjadi andalan utama penerimaan negara (Gemmel, 1999). Hal ini dapat dipahami karena pajak langsung terkait dengan pendapatan masyarakat. Di samping itu, pengenaan pajak langsung membutuhkan administrasi yang cukup rumit dibandingkan dengan pengenaan pajak tidak langsung. Namun, pada masa mendatang pemerintahan demokrasi makin mempercayai pajak langsung sebagai andalan penerimaan negara, karena pajak ini dapat disesuaikan dengan mudah pada kondisi seseorang. Sebaliknya, penyesuaian pajak tidak langsung dengan kondisi perorangan relatif lebih sulit (Samuelson dan Nordhaus, 1999).

## 2.5 Pajak Progresif, Pajak Proporsional, dan Pajak Regresif

Menurut Suparmoko (2004) struktur pajak dapat dibedakan dengan membandingkan antara beban pajak dengan basis pajaknya, yaitu:

- a. *Pajak Progresif*, yaitu pajak dikenakan dengan persentase yang makin tinggi dengan makin tingginya kemampuan membayar pajaknya (*taxable capacity*). Tarif pajak rata-rata (*average tax rate*) meningkat dengan makin tingginya basis pajak (*tax base*), dan tarif pajak marginal (*marginal tax rate*) lebih tinggi daripada *average tax rate*-nya. Tarif pajak rata-rata adalah (R) adalah jumlah pajak ( $T_x$ ) yang dipungut dibagi dengan basis pajak (B), atau  $R = T_x/B$  sedangkan tarif pajak marginal merupakan tambahan pajak yang dipungut sebagai akibat bertambahnya basis pajak, atau  $\Delta T_x/\Delta B$ .

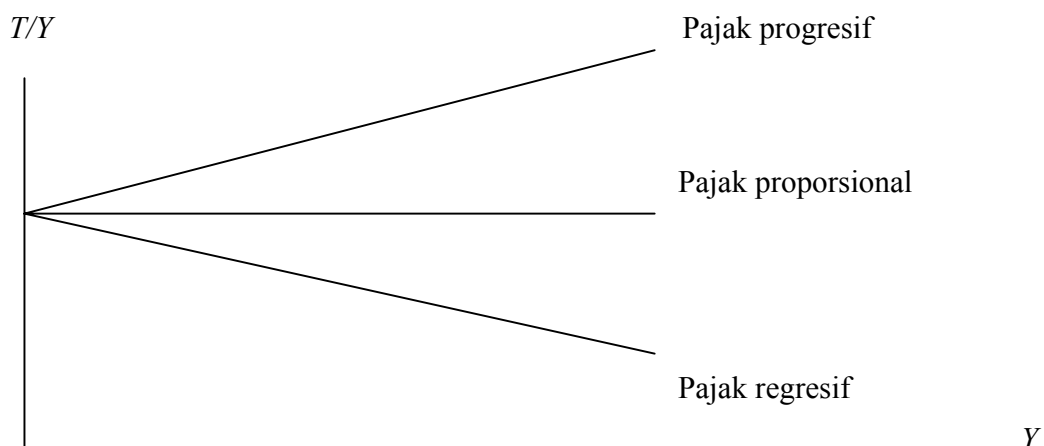
Sistem pajak progresif pada umumnya diterapkan pada pajak penghasilan untuk mengurangi kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Namun dalam praktiknya, pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia tidak sepenuhnya bersifat progresif. Hal ini dikarenakan untuk jenis-jenis penghasilan tertentu, tarif pajaknya bersifat proporsional.

- b. *Pajak Proporsional*, yaitu pajak dikenakan dengan persentase yang sebanding dengan *taxable capacity* atau *average tax rate* sama dengan *marginal tax rate*..

c. *Pajak Regresif*, yaitu pajak yang dikenakan dengan persentase yang kurang sebanding dengan *taxable capacity* atau *average tax rate* lebih tinggi daripada *marginal tax rate*.

Ketiga jenis pajak tersebut diilustrasikan pada Gambar 2.2 sebagai hubungan pajak dengan pendapatan.

**Gambar 2.2**  
**Hubungan Pajak dan Pendapatan**



*Sumber: Samuelson dan Nordhaus (1999)*

Keterangan:

$T/Y$  = Persentase pendapatan yang dibayarkan untuk pajak;  $Y$  = pendapatan

## **2.6 Pajak Penghasilan**

Pengenaan pajak penghasilan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 6

Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17

Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (untuk selanjutnya disingkat dengan UU PPh).

Dalam UU PPh yang dimaksud dengan pajak penghasilan adalah pajak yang

dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

### **2.6.1 Subjek Pajak**

Yang menjadi subjek pajak adalah (1) orang pribadi, (2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, (3) badan, dan (4) Bentuk Usaha Tetap. Subjek pajak dapat dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan baik dari dalam maupun luar Indonesia. Sedangkan subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi wajib pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di Indonesia, termasuk melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Tidak semua orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan menjadi subjek pajak. Pengecualian subjek pajak dalam UU PPh berlaku terhadap:

- a. Badan perwakilan negara asing,;
- b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
  - i) bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
  - ii) negara yang bersangkutan memperlakukan hal yang sama.
- c. Organisasi internasional, dengan syarat:

- i) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
  - ii) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.

### **2.6.2 Objek Pajak**

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Pengertian penghasilan adalah yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dari dalam maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Definisi penghasilan dalam UU PPh mengacu pada definisi penghasilan yang ideal (komprehensif) sebagaimana dikemukakan oleh Henry Simons (Mangkoesebroto, 2004). Dalam bentuk matematis, definisi penghasilan menurut Henry Simons adalah:

$$Y = C + \text{tambahan } W$$

dimana  $Y$  adalah penghasilan,  $C$  adalah konsumsi, dan  $W$  adalah kekayaan.

Pada dasarnya penghasilan yang dimaksud dalam UU PPh, dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, pengacara, dan sebagainya.
- b. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
- c. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, dan sebagainya.
- d. Penghasilan lain-lain, seperti hadiah undian, selisih lebih akibat revaluasi aktiva, keuntungan selisih kurs valuta asing, dan sebagainya.

Dalam UU PPh diatur pula mengenai pengecualian sebagai objek pajak. Yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah:

- a. 1) bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.  
2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi;
- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau

Pemerintah;

- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia;
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, termasuk penghasilan dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu;
- h. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
- i. bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha;
- j. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  - 1) merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor tertentu; dan
  - 2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

### **2.6.3 Basis Pajak dan Penghasilan Kena Pajak**

Pengertian basis pajak (*tax base*) dalam undang-undang perpajakan adalah dasar pengenaan pajak. Untuk PPh, basis pajaknya adalah penghasilan kena pajak (*taxable income*), yang diatur sebagai berikut:

- a. Bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri, yang menjadi basis pajaknya adalah penghasilan neto setelah dikurangi dengan PTKP.
- b. Bagi wajib pajak badan dalam negeri dan BUT, yang menjadi basis pajaknya adalah penghasilan neto.
- c. Bagi wajib pajak luar negeri, yang menjadi basis pajaknya adalah penghasilan bruto.

Penghasilan neto diperoleh dari mengurangi biaya-biaya yang diperkenankan UU PPh terhadap penghasilan brutonya.

#### 2.6.4 Tarif Pajak

Sesuai dengan Pasal 17 UU PPh, besarnya tarif pajak penghasilan diatur sebagai berikut:

- a. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 25 juta	5%
Di atas Rp 25 juta s.d. Rp 50 juta	10%
Di atas Rp 50 juta s.d. Rp 100 juta	15%
Di atas Rp 100 juta s.d. Rp 200 juta	25%
Di atas Rp 200 juta	35%

b. Wajib pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Sampai dengan Rp 50 juta	10%
Di atas Rp 50 juta s.d. Rp 100 juta	15%
Di atas Rp 100 juta	30%

Pajak penghasilan terutang dihitung dengan cara mengalikan penghasilan kena pajak (*taxable income*) setahun dengan tarif pajak, dengan rumus sebagai berikut:

a. PPh terutang bagi wajib pajak badan

$$= \text{Penghasilan Kena Pajak} \times \text{Tarif Pasal 17}$$

$$= \text{Penghasilan neto} \times \text{Tarif Pasal 17}$$

$$= (\text{Penghasilan bruto} - \text{biaya yang diperkenankan UU PPh}) \times \text{Tarif Pasal 17}$$

b. PPh terutang bagi wajib pajak orang pribadi

$$= \text{Penghasilan Kena Pajak} \times \text{Tarif Pasal 17}$$

$$= (\text{Penghasilan neto} - \text{PTKP}) \times \text{Tarif Pasal 17}$$

$$= [(\text{Penghasilan bruto} - \text{biaya yang diperkenankan UU PPh}) - \text{PTKP}] \times \text{Tarif Pasal 17}$$

Pada dasarnya wajib pajak dapat menghitung dan melunasi PPh terutangnya dengan dua cara, yaitu:

a. Pelunasan pajak tahun berjalan, yang meliputi:

1) Pembayaran sendiri oleh wajib pajak untuk setiap Masa Pajak.

2) Pembayaran pajak melalui pemotongan/pemungutan pihak ketiga.

b. Pelunasan pajak sesudah akhir tahun, dengan cara:

- 1) Melunasi pajak terutang yang kurang disetor melalui perhitungan sendiri.
- 2) Melunasi pajak terutang yang kurang disetor berdasarkan surat ketetapan pajak, apabila terdapat bukti bahwa jumlah PPh terutang tidak benar.

## **2.7 Jumlah Wajib Pajak**

Pertumbuhan penduduk merupakan unsur penting yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Penduduk yang besar akan menggerakkan berbagai kegiatan ekonomi dan merangsang tingkat output atau produksi agregat yang lebih tinggi dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh pendapatan nasional.

Selama proses pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh pertumbuhan basis pajak. Perluasan basis pajak penghasilan, baik objek maupun subjek pajak, bersumber dari meningkatnya pendapatan per kapita dan proses komersialisasi, yang pada gilirannya akan menimbulkan wajib pajak baru. Hal ini dikarenakan mereka yang dulunya belum dapat dikategorikan sebagai subjek pajak, dengan meningkatnya pendapatan dan proses komersialisasi, akan berubah menjadi subjek pajak.

## **2.8 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Suatu perekonomian secara makro akan selalu berkaitan dengan informasi dan pertanyaan-pertanyaan apakah perekonomian mengalami pertumbuhan dan seberapa besar pertumbuhannya? Apakah pertumbuhan tersebut lebih baik atau lebih buruk dibandingkan dengan tahun lalu? Sektor-sektor mana yang menjadi penggerak dalam

pertumbuhan ekonomi? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab tanpa adanya data tentang Produk Domestik Bruto atau PDB (Sukirno, 2000).

Di tingkat nasional, PDB diartikan sebagai nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di dalam suatu negara dalam periode tertentu. Sedangkan di tingkat daerah untuk mengetahui peranan dan potensi ekonomi dalam periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan perubahan nilai PDRB yang hanya dipengaruhi oleh perubahan harga pada tahun tertentu sebagai dasar (BPS, 2005).

Terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam menghitung PDRB yang ditimbulkan dari suatu wilayah, yaitu:

a. **Pendekatan Produksi**, adalah menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah, dikurangi biaya antara dari masing-masing total produksi bruto setiap kegiatan, sub sektor, atau sektor dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha, yaitu:

1. Pertanian
2. Pertambangan dan Penggalian

3. Industri Pengolahan
  4. Listrik, Gas, dan Air Bersih
  5. Bangunan
  6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran
  7. Pengangkutan dan Komunikasi
  8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan
  9. Jasa-jasa
- b. **Pendekatan Pendapatan**, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini mencakup juga penyusutan dan pajak tak langsung neto. Jumlah semua komponen pendapatan per sektor ini disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha).
- c. **Pendekatan Pengeluaran**, PDRB adalah semua permintaan akhir seperti:
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Lembaga Swasta Nirlaba
  2. Konsumsi Pemerintah
  3. Pembentukan Modal Tetap Bruto
  4. Perubahan Stok

## 5. Ekspor neto

Dari ketiga pendekatan tersebut, secara konsep jumlah pengeluaran harus sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah komponen nilai tambah bruto termasuk didalamnya balas jasa faktor produksi.

Dalam penelitian ini PDRB diinterpretasikan menurut pendekatan produksi, yakni menghitung jumlah nilai tambah produksi yang dihasilkan. Hal ini dilakukan karena data statistik di Indonesia sampai saat ini masih menggunakan pendekatan produksi baik di tingkat nasional maupun regional. Sukirno (2000) berpendapat bahwa di Indonesia sangat ditekankan menggunakan pendekatan produksi, adapun pendekatan pengeluaran dijadikan pendekatan sekunder dan pendekatan pendapatan tidak diperhitungkan.

Peningkatan PDRB merupakan hasil dari proses pembangunan ekonomi di suatu wilayah yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat (Insukindro, 1990). Pendapatan masyarakat menunjukkan kemampuan masyarakat untuk membiayai berbagai pengeluarannya termasuk untuk membayar pajak. Kemampuan seseorang untuk membayar pajak dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu tingkat pendapatan, jumlah kekayaan, dan besarnya pengeluaran konsumsi. Semakin tinggi tingkat pendapatan, kekayaan, dan konsumsi seseorang, berarti semakin tinggi kemampuan orang tersebut untuk membayar pajak dan berpengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan pajak (Miyasto, 1993).

## 2.10 Penelitian-penelitian Sebelumnya

Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh orang pribadi tidak banyak dilakukan, antara lain:

1. Arman Delis dan Budiono Sri Handoko (1996), meneliti tentang pertumbuhan dan perubahan struktur pajak di Indonesia. Salah satu hasil penelitiannya adalah PDB dan perubahan kebijakan perpajakan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan pajak langsung. Dengan kata lain, di tingkat daerah variabel PDRB per kapita cukup penting dalam menentukan penerimaan PPh orang pribadi.

Bedanya dengan penelitian ini yaitu bahwa mereka menganalisis pengaruh PDB terhadap pertumbuhan pajak langsung dengan data-data di tingkat nasional, sedangkan dalam penelitian ini akan mengkhususkan pada analisis pengaruh PDRB terhadap satu jenis pajak yaitu PPh orang pribadi untuk Kota Semarang.

2. Yurzal dan Akhmad Makhfatih (2000), meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan, dan hasilnya adalah kebijakan reformasi perpajakan tidak mempengaruhi fungsi model penerimaan pajak penghasilan. Jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan dalam jangka pendek tidak memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Tetapi dalam jangka panjang keduanya berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Jumlah KPP dalam jangka pendek dan panjang dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan.

Dalam penelitian ini ruang lingkupnya hanya PPh Orang Pribadi Kota Semarang.

3. Departemen Republik Indonesia (2000) telah mengadakan penelitian mengenai elastisitas PPh di Indonesia. Salah satu faktor penentu elastisitas PPh adalah kebijakan reformasi perpajakan.

Dalam penelitian ini ruang lingkungannya hanya Kota Semarang untuk jenis PPh orang pribadi.

4. Masrofi (2004) meneliti tentang potensi dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Semarang. Salah satu hasil penelitiannya adalah adanya perubahan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Bedanya dengan penelitian ini adalah jenis pajaknya merupakan pajak pusat, yaitu PPh Orang Pribadi.

5. Hadi Sasana (2005), meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB, yang salah satu hasilnya adalah variabel PDRB per kapita, jumlah wajib pajak, inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Banyumas.

Sedangkan penelitian ini mengkhususkan pada penerimaan PPh Orang Pribadi untuk Kota Semarang tanpa menggunakan variabel inflasi.

Ringkasan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini disajikan pada Tabel 2.1. berikut ini.

**Tabel 2.1.**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Peneliti dan Judul</b>	<b>Variabel Yang Digunakan</b>	<b>Metode Analisis</b>	<b>Hasil</b>
------------	---------------------------	--------------------------------	------------------------	--------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<b>Arman Delis dan Budiono Sri Handoko (1996)</b> Analisis Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Pajak di Indonesia: 1968-1993	a. <i>Tax Buoyancy</i> : VTB: Total Penerimaan Pajak VB: PDB nonmigas  b. Struktur Pajak: VTB: Rasio Pajak VB: Pendapatan Nasional, Sektor Industri, Sektor Luar Negeri, Jumlah Uang Beredar, Kebijakan Reformasi PPh, PPN, dan PBB.	a. Elastisitas Pajak: Indeks Divisia Agregat dan Disagregat  b. <i>Tax Buoyancy</i> dan Struktur Pajak: Regresi PAM dan ECM terhadap data sekunder <i>time series</i>	a. Laju pertumbuhan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan basis dan perubahan kebijakan pajak. b. Penerimaan pajak relatif elastis terhadap perubahan PDB nonmigas.
2.	<b>Yurzal dan Akhmad Makhfatih (2000)</b> Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PPh Periode 1970 – 1998 Melalui <i>Error Correction Model</i>	VTB: Penerimaan Pajak Penghasilan VB: PDB per kapita, Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi, Jumlah Wajib Pajak Badan, dan Jumlah Kantor Pelayanan Pajak.	Regresi ECM terhadap data sekunder <i>time series</i>	Baik dalam jangka pendek maupun panjang variabel PDB per kapita, Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi, Jumlah Wajib Pajak Badan, dan Jumlah Kantor Pelayanan Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.
3.	<b>Russel S. Sobel dan Randall G. Holcombe (1996)</b> <i>Measuring the Growth and Variability of Tax Bases Over the Business Cycle</i>	VTB: Penerimaan Pajak VB: PDB	Regresi ECM linier terhadap data sekunder AS <i>time series</i> tahun 1951-1991	Penaksir elastisitas pendapatan terhadap PDB adalah relatif stabil, sehingga dapat bermanfaat untuk merancang kebijakan pajak masa depan.
4.	<b>Departemen Keuangan Republik Indonesia (2000)</b> Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam	Elastisitas PPh: VTB: Pajak Penghasilan VB: PDB non migas dan Kebijakan Reformasi	Regresi linier terhadap data sekunder <i>time series</i> (1969/1970 – 1999/2000)	Elastisitas PPh terbagi atas tiga macam: - berkaitan dengan kebijakan reformasi tahun 1984 sebesar 1,137 - berkaitan dengan

	Mengoptimalkan Penerimaan Pajak			kebijakan reformasi tahun 1994 sebesar 1,164 - berkaitan dengan krisis ekonomi tahun 1997 sebesar 1,186
4.	<b>Veronika W.A. (2004)</b> Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah (Tahun 1998-2001)	VTB: Penerimaan Pajak Daerah VB: Pendapatan per kapita, Jumlah wisatawan, Jumlah Hotel, Investasi Pemda, dan Daya Listrik Tersambung	Regresi linier berganda metode <i>pooling data</i> (OLS).	Semua variabel, kecuali variabel jumlah hotel, berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.
5.	<b>Muhammad Masrofi (2004)</b> Potensi dan Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Studi Kasus di Kota Semarang)	VTB: Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah VB: PDRB Riil, Inflasi, Jumlah Penduduk, dan Perubahan Peraturan: UU No. 18 Tahun 1997	a. Regresi linier berganda <i>time series</i> (OLS) terhadap data sekunder 1983/1984-2002 b. Analisis <i>Overlay</i>	Semua variabel, kecuali inflasi dan perubahan peraturan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Semarang.
6	<b>Hadi Sasana (2005)</b> Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PBB (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas)	VTB: Penerimaan PBB VB: PDRB per kapita, Jumlah Wajib Pajak, Inflasi, Jumlah Luas Lahan, Jumlah Bangunan, dan Krisis Moneter	Regresi linier berganda (OLS) terhadap data sekunder <i>time series</i> tahun 1986/1987-2001/2002	Semua variabel, kecuali variabel krisis moneter, berpengaruh positif terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Banyumas
7.	<b>Muchlis (2002)</b> Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan PBB (Studi	VTB: Penerimaan PBB VB: Jumlah Luas Lahan, Jumlah Luas Bangunan, Jumlah Wajib Pajak, dan Tertib Administrasi	Regresi linier berganda (OLS) terhadap data sekunder <i>time series</i> tahun 1998-2001	a. Semua variabel berpengaruh positif terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal.

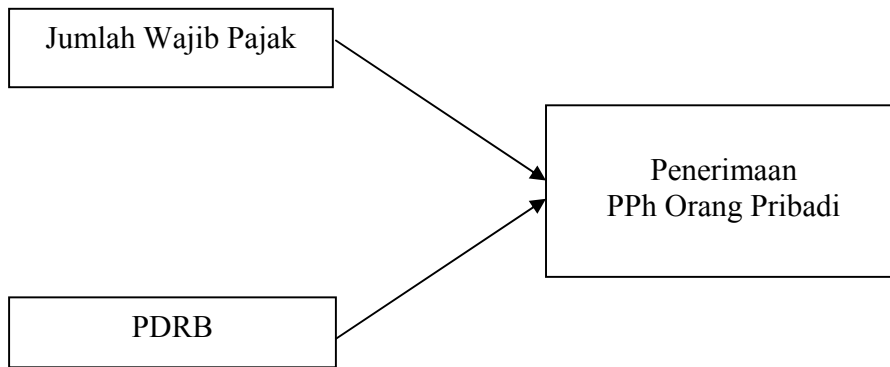
	Komparasi antara Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal)			b. Terdapat struktur penerimaan PBB yang berbeda antara Kabupaten Brebes dengan Kabupaten Tegal.
--	--	--	--	--

*Sumber:* Berbagai Media Penelitian (2006)

### **2.11 Kerangka Pemikiran Teoritis**

Dari kajian teoritis dan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dalam menjalankan otonomi daerah diperlukan sumber dana yang berkesinambungan. Salah satu sumber dana yang dapat diandalkan oleh pemerintah daerah adalah penerimaan dana bagi hasil pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP). Semakin tinggi penerimaan PPh OP maka semakin besar bagi hasil yang akan diperoleh pemerintah daerah. Di lain pihak pertumbuhan PPh OP tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah tersebut yang tercermin dalam PDRB. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan menyebabkan pendapatan masyarakat meningkat pula. Dari peningkatan pendapatan masyarakat tersebut akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya termasuk membayar PPh OP. Di samping itu, pendapatan masyarakat yang meningkat akan menciptakan wajib pajak orang pribadi baru yang sebelumnya belum dikenakan pajak. Oleh karena itu, jumlah wajib pajak orang pribadi dan PDRB merupakan variabel penting dalam penerimaan PPh OP. Hubungan masing-masing variabel dapat dilihat pada Kerangka Pemikiran Teoritis seperti dalam Gambar 2.3 berikut ini:

**Gambar 2.3**  
**Kerangka Pemikiran Teoritis**



### **2.12 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang belum sepenuhnya dialami kebenarannya. Pendapat lain yang memberikan batasan hipotesis sebagai kesimpulan sementara tentang hubungan antara tiga variabel atau lebih (Singarimbun, 1984).

Dari pengertian tersebut, sejalan dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

Terdapat perbedaan antara jenis lapangan usaha dalam mempengaruhi penerimaan PPh Orang Pribadi Kota Semarang.

Jumlah wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi Kota Semarang.

PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi Kota Semarang.

Jumlah wajib pajak orang pribadi dan PDRB secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi Kota Semarang.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang direncanakan adalah pertama dengan menentukan definisi operasional variabel serta jenis dan sumber data. Kedua, menganalisis data yang didasari oleh suatu landasan teori sebagai bahan kesimpulan dalam pemecahan masalah dan tujuan yang ingin dicapai. Akhirnya, melakukan pengujian inferensi guna mendukung pemecahan permasalahan.

#### **3.1. Definisi Operasional Variabel**

Variabel-variabel pengamatan yang diukur dan digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. PPh Orang Pribadi (PPhOP) adalah jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi berdasarkan laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dari Wajib Pajak Orang Pribadi dalam satu tahun dan dalam satuan rupiah.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah jumlah penduduk Kota Semarang yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, melaporkan SPT Tahunan PPh, dan membayar PPh Orang Pribadi dalam satu tahun.
3. PDRB adalah PDRB Kota Semarang berdasarkan lapangan usaha atas harga berlaku *minus* lapangan usaha listrik, gas, dan air bersih dalam satu tahun dan dalam satuan rupiah.

Untuk mengestimasi penerimaan PPh Orang Pribadi akan menggunakan variabel *dummy* jenis lapangan usaha. Jumlah lapangan usaha yang diamati dalam penelitian ini sebanyak 8 (delapan) lapangan usaha, yaitu:

- 1) Lapangan Usaha Pertanian;
- 2) Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian;
- 3) Lapangan Usaha Industri Pengolahan;
- 4) Lapangan Usaha Bangunan;
- 5) Lapangan Usaha Perdagangan, Hotel, dan Restoran;
- 6) Lapangan Usaha Pengangkutan dan Komunikasi;
- 7) Lapangan Usaha Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan;
- 8) Lapangan Usaha Jasa-jasa.

Mengingat jumlah lapangan usaha ada 8 jenis, maka dibutuhkan sebanyak 7 variabel *dummy* yaitu:

1.  $DUM_1 = 1$  jika lapangan usaha pertanian  
0 jika lapangan usaha lainnya
2.  $DUM_2 = 1$  jika lapangan usaha pertambangan dan penggalian  
0 jika lapangan usaha lainnya
3.  $DUM_3 = 1$  jika lapangan usaha industri pengolahan  
0 jika lapangan usaha lainnya
4.  $DUM_4 = 1$  jika lapangan usaha bangunan  
0 jika lapangan usaha lainnya
5.  $DUM_6 = 1$  jika lapangan usaha pengangkutan dan komunikasi

0 jika lapangan usaha lainnya

6.  $DUM_7 = 1$  jika lapangan usaha keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan

0 jika lapangan usaha lainnya

7.  $DUM_8 = 1$  jika lapangan usaha jasa-jasa

0 jika lapangan usaha lainnya

Kategori dasar (*benchmark*) yang ditetapkan dalam variabel *dummy* ini adalah lapangan usaha perdagangan, hotel, dan restoran dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. lapangan usaha ini memberikan kontribusi penerimaan PPh Orang Pribadi yang tinggi;
- b. merupakan lapangan usaha andalan Kota Semarang dengan PDRB yang selalu tertinggi untuk periode pengamatan;
- c. tipologi Kota Semarang itu sendiri sebagai kota yang berbasis perdagangan.

### **3.2. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Jenis data tersebut berupa:

- a. Data pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dari wajib pajak yang berdomisili di Kota Semarang tahun 1999-2004. Data ini diperoleh dari empat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Semarang yang berisi informasi jumlah wajib pajak orang pribadi dan jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
- b. Data PDRB per lapangan usaha di Kota Semarang tahun 1999-2004 yang

diperoleh dari BPS Propinsi Jawa Tengah.

Untuk kepentingan analisis, data-data yang diperoleh tersebut digabungkan menjadi data panel. Dipilihnya data panel karena data panel dapat memperkaya analisis empiris dalam berbagai cara yang tidak mungkin dilakukan hanya dengan data kerat lintang maupun serial waktu (Gujarati, 2003). Sedangkan dipilihnya tahun 1999-2004 sebagai tahun pengamatan dengan asumsi bahwa tahun 1999 telah bebas dari pengaruh krisis moneter tahun 1997.

### 3.3. Teknik dan Alat Analisis

Model analisis yang digunakan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh Orang Pribadi adalah model regresi data panel. Berdasarkan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini maka hubungan antar variabelnya digambarkan dalam fungsi PPh OP sebagai berikut:

$$PPh\ OP = f(WP\ OP, PDRB) \dots\dots\dots (3.1)$$

PPh OP diasumsikan sebagai fungsi produksi sehingga secara matematis fungsi penerimaan PPh OP dapat ditulis sebagai berikut:

$$PPh\ OP = \beta WPOP^{\beta_2} \cdot PDRB^{\beta_3} \dots\dots\dots (3.2)$$

Agar model tersebut dapat ditaksir hasilnya dan dapat diketahui nilai elastisitas variabel independennya maka dari model dasar penelitian kemudian ditransformasikan dalam bentuk logaritma, sehingga model ekonometrikanya menjadi:

$$LogPPh\ OP = \beta_1 + \beta_2 LogWPOP + \beta_3 LogPDRB + \mu \dots\dots\dots (3.3)$$

Selanjutnya fungsi tersebut diubah dalam bentuk model regresi data panel sebagai berikut:

$$\text{LogPPh } OP_{it} = \beta_{1i} + \beta_2 \text{LogWPOP}_{it} + \beta_3 \text{LogPDRB}_{it} + \mu_{it} \dots\dots\dots (3.4)$$

$i$  = lapangan usaha 1, 2, ..., 8.

$t$  = tahun 1, 2, ..., 6.

Untuk menaksir  $\beta_{1i}$  diasumsikan bahwa koefisien *slope* konstan tetapi koefisien intersep berbeda diantara lapangan usaha. Perbedaan ini dikarenakan masing-masing lapangan usaha memiliki karakteristik yang berbeda, seperti gaya manajerial atau filosofi manajerialnya (Gujarati, 2003). Oleh karena itu, model (3.4) diubah dalam bentuk model *Least Squares Dummy Variable* (LSDV) menjadi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{LogPPh } OP_{it} = & \alpha_0 + \alpha_1 \text{Dum}_1 + \alpha_2 \text{Dum}_2 + \alpha_3 \text{Dum}_3 + \alpha_4 \text{Dum}_4 + \alpha_6 \text{Dum}_6 + \\ & \alpha_7 \text{Dum}_7 + \alpha_8 \text{Dum}_8 + \beta_2 \text{LogWPOP}_{it} + \beta_3 \text{LogPDRB}_{it} + \mu_{it} \\ & \dots\dots\dots (3.5) \end{aligned}$$

dimana:

$\alpha_0$  = konstanta

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_6, \alpha_7, \alpha_8$  = koefisien intersep diferensial

$\beta_2, \beta_3$  = koefisien *slope*

$PPhOP_{it}$  = Penerimaan PPh Orang Pribadi pada lapangan usaha  $i$  tahun  $t$

$WPOP_{it}$  = Jumlah WP Orang Pribadi pada lapangan usaha  $i$  tahun  $t$

$PDRB_{it}$  = PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha  $i$  tahun  $t$

$\text{Dum}_1$  = 1 jika lapangan usaha pertanian  
 0 jika lapangan usaha lainnya

- $Dum_2$  = 1 jika lapangan usaha pertambangan dan penggalian  
0 jika lapangan usaha lainnya
- $Dum_3$  = 1 jika lapangan usaha industri pengolahan  
0 jika lapangan usaha lainnya
- $Dum_4$  = 1 jika lapangan usaha bangunan  
0 jika lapangan usaha lainnya
- $Dum_6$  = 1 jika lapangan usaha pengangkutan dan komunikasi  
0 jika lapangan usaha lainnya
- $Dum_7$  = 1 jika lapangan usaha keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan  
0 jika lapangan usaha lainnya
- $Dum_8$  = 1 jika lapangan usaha jasa-jasa  
0 jika lapangan usaha lainnya

### **3.4. Pengujian Hipotesis**

#### **3.4.1 Pengujian Teoritis**

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah koefisien regresi yang dihasilkan sesuai dengan teori yang mendukung penelitian ini. Sesuai dengan teori yang diuraikan sebelumnya bahwa pertumbuhan penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan wajib pajak dan PDRB sehingga mempunyai hubungan searah (positif).

#### **3.4.2 Pengujian Statistik**

##### **3.4.2.1 Uji $t$**

Uji  $t$  dimaksudkan untuk melihat tingkat pentingnya variabel bebas secara individu terhadap variabel tak bebas. Nilai  $t_{hitung}$  diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$T_{hitung} = \frac{\beta_i}{(Se \beta_i)}$$

dimana:

$\beta_i$  = parameter yang diestimasi

$Se \beta_i$  = standar error  $\beta_i$

Jika nilai  $t_{hitung}$  yang diperoleh lebih besar dari pada nilai  $t_{tabel}$  pada prosedur pengujian dengan derajat keyakinan tertentu dan dengan  $df = N - k$ , maka dapat menolak hipotesis nol. Hal ini berarti variabel bebas  $i$  berpengaruh secara nyata (penting secara statistik) terhadap variabel tak bebas.

#### 3.4.2.2 Uji $F$

Uji  $F$  dimaksudkan untuk melihat tingkat pentingnya variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel tak bebas. Nilai  $F_{hitung}$  diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$F = \frac{ESS / (k - 1)}{RSS / (N - k)}$$

dimana:

$k$  = jumlah parameter yang diestimasi termasuk konstanta

$N$  = jumlah pengamatan

$ESS$  = error sum of squares

$RSS$  = residual sum of squares

Jika nilai  $F_{hitung}$  yang diperoleh lebih besar daripada nilai  $F_{tabel}$  maka hipotesis nol ditolak. Hal ini berarti secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh secara nyata (penting secara statistik) terhadap variabel tak bebas. Begitu pula sebaliknya, jika nilai  $F_{hitung}$  yang diperoleh lebih kecil dari pada nilai  $F_{tabel}$  maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel bebas tidak berpengaruh secara nyata terhadap variabel tak bebas.

#### **3.4.2.3 Uji Determinasi ( $R^2$ )**

Uji determinasi merupakan gambaran seberapa jauh variabel-variabel penjelas dapat menerangkan variabel tak bebas. Koefisien determinasi dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$R^2 = \frac{\sum e_i}{\sum Y_i}$$

dimana:

$\sum e_i / \sum Y_i$  adalah variasi yang tidak dapat dijelaskan dari yang aktual di sekitar  $Y$  estimasi rata-rata.

#### **3.4.3 Pengujian Penyimpangan Asumsi Klasik**

Dalam pengujian penyimpangan asumsi klasik dilihat ada tidaknya masalah multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan normalitas (Firmansyah, 2001).

##### **a. Pengujian Multikolinearitas**

Multikolinearitas adalah suatu keadaan yang satu atau lebih variabel penjelas dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari variabel penjelas lainnya. Hubungan seperti ini dapat sempurna ataupun tidak sempurna. Multikolinearitas dapat diduga bila nilai  $R^2$  cukup tinggi dan nilai koefisien korelasi sederhana juga tinggi. Tetapi tak satupun atau sedikit sekali koefisien regresi parsial yang signifikan secara individu. Konsekuensi lainnya dengan adanya multikolinearitas adalah meskipun penaksir OLS bisa diperoleh, tetapi kesalahan standarnya cenderung membesar dengan meningkatnya tingkat korelasi antara peningkatan variabel. Oleh karena itu, selang keyakinan untuk parameter populasi yang relevan cenderung lebih besar (Firmansyah, 2001).

#### **b. Pengujian Heteroskedastisitas**

Homoskedastisitas terjadi bila distribusi probabilitas tetap sama dalam semua observasi  $x$ , dan varians setiap residual adalah sama untuk semua variabel penjelas, yaitu :

$$\text{Var}(u) = E[u_i - E(u_i)]^2$$

Penyimpangan terhadap asumsi di atas disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam model digunakan *White Test*. Uji ini dilakukan dengan meregres residual kuadrat ( $U_i^2$ ) dengan variabel bebas, variabel bebas kuadrat, dan perkalian variabel bebas. Dapatkan nilai  $R^2$  untuk menghitung  $\chi^2$ , dimana  $\chi^2 = n \cdot R^2$ . Apabila  $\chi^2$  -hitung  $<$   $\chi^2$  -tabel, maka hipotesis alternatif adanya heteroskedastisitas dalam model ditolak.

### c. Pengujian Autokorelasi

Penaksiran model regresi linier mengandung asumsi bahwa tidak ada autokorelasi atau korelasi serial di antara *disturbance term*-nya (Firmansyah, 2001). Pengujian autokorelasi dalam model estimasi dapat dilakukan dengan menggunakan *Durbin Watson test*, yaitu melihat nilai  $d$  hitung model regresi. Apabila hipotesis nol ( $H_0$ ) adalah tidak ada serial autokorelasi baik positif maupun negatif, maka jika:

$d < d_L$  : menolak  $H_0$

$d > 4 - d_L$  : menolak  $H_0$

$d_U < d < 4 - d_U$  : tidak menolak  $H_0$

$d_L \leq d \leq d_U$  : pengujian tidak meyakinkan

$4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$  : pengujian tidak meyakinkan

Uji autokorelasi lainnya adalah *Breusch-Godfrey Test (BG Test)*, yaitu dengan meregres variabel pengganggu  $u_t$  dengan menggunakan *autoregressive model* orde  $p$ . Secara manual, jika  $(n-p) \cdot R^2$  atau  $\chi^2$  hitung lebih besar dari  $\chi^2$  tabel, maka menolak  $H_0$  yang menyatakan tidak ada korelasi dalam model.

### d. Pengujian Normalitas

Untuk penerapan OLS regresi linear klasik, diasumsikan bahwa distribusi probabilitas dari gangguan  $u_i$  memiliki nilai rata-rata yang diharapkan sama dengan nol, tidak berkorelasi dan mempunyai varian yang konstan. Dalam penelitian ini akan menggunakan uji Jarque-Bera (*J-B test*) untuk mengetahui normal atau tidaknya faktor gangguan  $u_i$ .

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG**

#### **4.1. Letak Geografis dan Batas Wilayah**

Kota Semarang terletak pada 6°50' LS - 7°10' LS dan 109°50' BT - 110°50'

BT. Secara administratif Kota Semarang memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Laut Jawa
- Sebelah Selatan: Kabupaten Semarang
- Sebelah Barat: Kabupaten Kendal
- Sebelah Timur: Kabupaten Demak

Kota Semarang memiliki 16 kecamatan, yaitu Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Gajah Mungkur, Semarang Selatan, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara, Semarang Tengah, Semarang Barat, Tugu, dan Ngaliyan.

#### **4.2. Luas Wilayah**

Luas wilayah Kota Semarang adalah 37.370,39 hektar, yang terbagi atas 3.897,97 hektar tanah sawah dan 33.472,42 hektar tanah kering. Kecamatan Mijen memiliki luas tanah terbesar di Kota Semarang (6.215,25 hektar), sedangkan Kecamatan Gayamsari memiliki luas tanah terkecil, yaitu 549,47 hektar. Adapun

rincian luas tanah (baik sawah maupun kering) di masing-masing kecamatan di Kota Semarang dapat dilihat pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Luas Wilayah Kota Semarang**  
**(Hektar)**

<b>Kecamatan</b>	<b>Tanah Sawah</b>	<b>Tanah Kering</b>	<b>Jumlah</b>	<b>% Terhadap Luas Kota</b>
Mijen	1.008,89	5.206,36	6.215,25	16,63
Gunungpati	1.382,00	4.017,09	5.399,09	14,45
Banyumanik	95,00	2.418,06	2.513,06	6,72
Gajah Mungkur	0,00	764,98	764,98	2,05
Semarang Selatan	0,00	848,05	848,05	2,27
Candisari	0,00	555,51	555,51	1,49
Tembalang	432,00	3.988,00	4.420,00	11,83
Pedurungan	64,00	2.008,00	2.072,00	5,54
Genuk	94,00	2.644,44	2.738,44	7,33
Gayamsari	19,50	529,97	549,47	1,47
Semarang Timur	0,00	770,25	770,25	2,06
Semarang Utara	0,00	1.133,28	1.133,28	3,03
Semarang Tengah	0,00	604,99	604,99	1,62
Semarang Barat	18,57	2.368,13	2.386,71	6,39
Tugu	460,00	2.669,34	3.129,34	8,37
Ngaliyan	324,00	2.945,97	3.269,97	8,75
<b>Jumlah</b>	<b>3.897,97</b>	<b>33.472,42</b>	<b>37.370,39</b>	<b>100,00</b>

Sumber: *BPS Prop. Jateng: Kota Semarang Dalam Angka Tahun 2004*

Pada Tabel 4.1 terlihat bahwa wilayah Kota Semarang hampir seluruhnya (90%) berupa tanah kering. Kondisi semacam ini berpotensi besar untuk lahan pemukiman dan industri. Sehingga dengan wilayah yang sedemikian luas, pertumbuhan perekonomian dengan sumber daya manusia di Kota Semarang berpotensi untuk berkembang.

### 4.3. Kependudukan

#### 4.3.1 Jumlah Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk Kota Semarang relatif kecil dari tahun ke tahun. Pada tahun 1999 penduduk Kota Semarang berjumlah 1.290.159 orang (Dewasa 921.756 orang) sedangkan pada tahun 2004 penduduk Kota Semarang hanya mencapai 1.389.421 orang (Dewasa 1.120.269 orang) atau mengalami kenaikan rata-rata 1,28% per tahun. Jumlah penduduk yang besar ini merupakan aset dalam menggerakkan roda perekonomian Kota Semarang. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan tersebut mutlak diperlukan. Laju pertumbuhan penduduk Kota Semarang pada tahun 1999-2004 tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut.

**Tabel 4.2**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Semarang**  
**Tahun 1999-2004**

Tahun	Penduduk			% Pertumbuhan
	Dewasa	Anak-anak	Jumlah	
1999	921.756	368.403	1.290.159	-
2000	935.457	374.210	1.309.667	1,51
2001	1.063.218	259.102	1.322.320	0,97
2002	1.081.934	268.071	1.350.005	2,09
2003	1.114.636	263.557	1.378.193	2,09
2004	1.120.269	269.152	1.389.421	0,81

Sumber: BPS Provinsi Jateng: Kota Semarang Dalam Angka 1999-2005

#### 4.3.2 Mata Pencaharian Penduduk

Sebagian besar penduduk Kota Semarang bermata pencaharian sebagai buruh yang pada tahun 1999 hanya sebanyak 313.650 orang, pada tahun 2004 meningkat menjadi 352.674. Mata pencaharian penduduk Kota Semarang pada tahun 1999-2004 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.3.

**Tabel 4.3**  
**Mata Pencaharian Penduduk Kota Semarang**  
**Tahun 1999-2004**

No.	Mata Pencaharian	Tahun					
		1999	2000	2001	2002	2003	2004
1	Petani	31.708	23.224	23.669	22.975	24.259	24.315
2	Buruh	313.650	321.115	326.523	357.718	346.704	352.674
3	Nelayan	2.887	1.997	2.001	2.228	2.227	2.301
4	Pengusaha	15.305	18.073	18.535	15.388	18.587	18.819
5	Pedagang	75.012	73.095	73.481	74.383	75.826	77.603
6	Angkutan	30.570	28.473	23.761	23.913	27.763	28.197
7	PNS & ABRI	95.143	87.662	90.233	90.967	91.135	92.059
8	Pensiunan	39.231	37.727	36.748	37.096	35.258	35.728
9	Lain-lainnya	283.746	242.001	221.086	223.554	234.017	236.925
<b>Jumlah</b>		<b>887.252</b>	<b>833.367</b>	<b>816.037</b>	<b>848.222</b>	<b>855.776</b>	<b>868.621</b>

Sumber: BPS Provinsi Jateng: Kota Semarang Dalam Angka 1999-2005

#### 4.4. Keuangan

Untuk membiayai berbagai pengeluaran daerah, Pemerintah Kota Semarang memerlukan dana besar yang dapat diperoleh dari berbagai sumber. Secara garis besar penerimaan daerah berasal dari empat sumber, yaitu: 1) Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan; 3) Lain-lain Penerimaan Yang Sah; dan 4) Pinjaman.

Rincian realisasi penerimaan Pemerintah Kota Semarang tahun 2000-2004 dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut ini.

**Tabel 4.4**  
**Realisasi Penerimaan Kota Semarang**  
**Tahun 2000-2004**  
**(Dalam Jutaan Rupiah)**

Jenis Penerimaan	Tahun				
	2000	2001	2002	2003	2004
<b>1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>48.741</b>	<b>85.523</b>	<b>122.591</b>	<b>143.156</b>	<b>155.824</b>
1. Pajak Daerah	29.938	49.079	66.500	82.476	94.174
2. Retribusi Daerah	14.971	28.415	36.436	41.618	46.115
3. Laba Usaha Daerah	67	181	296	270	307
4. Lain-lain	3.765	7.848	19.359	18.792	15.228
<b>2. Dana Perimbangan</b>	<b>166.812</b>	<b>323.959</b>	<b>376.669</b>	<b>455.813</b>	<b>516.899</b>
1. Bagi Hasil Pajak	35.207	64.981	108.070	145.298	195.409
2. Bagi Hasil Non Pajak	1.248	1.479	1.649	1.805	2.386
3. Dana Alokasi Umum (DAU)	75.877	254.262	266.950	308.710	314.104
4. Dana Alokasi Khusus (DAK)	54.480	3.237	-	-	5.000
<b>3. Lain-lain Penerimaan Sah</b>	<b>329</b>	<b>21.256</b>	<b>11.444</b>	<b>39.029</b>	<b>26.438</b>
<b>4. Pinjaman Pemda</b>	<b>-</b>	<b>9.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah</b>	<b>215.882</b>	<b>439.738</b>	<b>510.704</b>	<b>637.998</b>	<b>699.161</b>

Sumber: BPS Provinsi Jateng: Kota Semarang Dalam Angka 1999-2005

Pada Tabel 4.4 terlihat bahwa dari tahun 2000 sampai dengan 2004 porsi Dana Perimbangan terhadap penerimaan total Kota Semarang selalu lebih tinggi daripada sumber penerimaan lainnya. Pada tahun 2000 penerimaan Dana Perimbangan hanya sebesar Rp 166.812 juta atau 77% dari penerimaan total, pada tahun 2004 telah meningkat menjadi Rp 516.899 juta atau 74% dari penerimaan total. Gambaran ini menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan Kota Semarang terhadap pemerintah

pusat masih sangat tinggi, sekaligus mengindikasikan bahwa proses otonomi daerah di Kota Semarang belum berjalan secara efektif.

#### **4.5 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang ditunjukkan pada angka-angka yang tercantum dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selama tahun 1999-2004 PDRB Kota Semarang selalu meningkat. Selama periode tersebut lapangan usaha perdagangan, hotel, dan restoran masih menjadi dominan di Kota Semarang yang disusul dengan berturut-turut lapangan usaha industri pengolahan dan jasa-jasa. Pada tahun 1999 PDRB dari lapangan usaha perdagangan, hotel, dan restoran menurut harga berlaku hanya Rp 4,58 triliun (40,96%) telah meningkat menjadi Rp 8,13 triliun (38,81%) di tahun 2004 atau rata-rata pertumbuhannya per tahun sekitar 15%. Sementara itu kontribusi lapangan usaha industri pengolahan dan jasa-jasa tahun 1999 masing-masing sebesar 27,60% dan 12,57% meningkat menjadi 29,26% dan 12,74% di tahun 2004 atau rata-rata pertumbuhannya per tahun sekitar 20% dan 18%. Apabila dilihat laju pertumbuhan, lapangan usaha industri pengolahan lebih unggul dibandingkan dua jenis lapangan usaha lainnya untuk periode 1999-2004. Gambaran PDRB menurut lapangan usaha Kota Semarang dapat dilihat pada Tabel 4.5 dan Tabel 4.6 (halaman 51). Sedangkan distribusi persentase PDRB disajikan pada Tabel 4.7 dan Tabel 4.8 (halaman 52).

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Hasil Pengujian Data

Hasil estimasi penerimaan PPh Orang Pribadi berdasarkan model *LSDV* (3.5) dengan menggunakan program *Eviews* 4.1 tercantum dalam Tabel 5.1 sebagai berikut:

**Tabel 5.1**  
**Hasil Estimasi Model Regresi *Least-Squares Dummy Variable* (LSDV)**  
**Untuk Logaritma Penerimaan PPh Orang Pribadi**

Variabel	Koefisien Parameter	Kesimpulan
<i>C</i>	-19,96187* (-2,677652)	$H_0$ ditolak
<i>DUM</i> <sub>1</sub>	4,916561* (4,793869)	$H_0$ ditolak
<i>DUM</i> <sub>2</sub>	7,713657* (5,281820)	$H_0$ ditolak
<i>DUM</i> <sub>3</sub>	1,095941** (2,056623)	$H_0$ ditolak
<i>DUM</i> <sub>4</sub>	3,768156* (3,493206)	$H_0$ ditolak
<i>DUM</i> <sub>6</sub>	2,576687* (4,315342)	$H_0$ ditolak
<i>DUM</i> <sub>7</sub>	2,835267* (5,299525)	$H_0$ ditolak
<i>DUM</i> <sub>8</sub>	2,464114* (5,908287)	$H_0$ ditolak
<i>WPOP</i>	1,422425* (5,209826)	$H_0$ ditolak
<i>PDRB</i>	1,041910* (3,588780)	$H_0$ ditolak
$R^2 = 0,986532$	$F$ -statistik = 309,2838	DW = 1,638103

Keterangan:

\* = signifikan pada taraf 1 persen

\*\* = signifikan pada taraf 5 persen

$F_{\text{tabel}} (1\%, 9, 40) = 2,89$

Angka dalam kurung adalah t-statistik

$\text{LogPPhOP}$  = Logaritma penerimaan PPh Orang Pribadi (rupiah)

$C$  = Konstanta

$DUM_1$  = *Dummy* lapangan usaha pertanian

$DUM_2$  = *Dummy* lapangan usaha pertambangan dan penggalian

$DUM_3$  = *Dummy* lapangan usaha industri pengolahan

$DUM_4$  = *Dummy* lapangan usaha bangunan

$DUM_6$  = *Dummy* lapangan usaha pengangkutan dan komunikasi

$DUM_7$  = *Dummy* lapangan usaha keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan

$DUM_8$  = *Dummy* lapangan usaha jasa-jasa

$\text{LogWPOP}$  = Logaritma jumlah wajib pajak orang pribadi yang membayar PPh orang pribadi (orang)

$\text{LogPDRB}$  = Logaritma PDRB *minus* lapangan usaha listrik, gas, dan air bersih atas dasar harga berlaku (rupiah)

### 5.1.1 Pengujian Teoritis

Hasil analisis data menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi (WPOP) dan PDRB memiliki hubungan searah (positif) dengan penerimaan PPh Orang Pribadi (PPHOP). Hasil ini secara *a priori* telah sesuai dengan teori ekonomi bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang membayar PPh Orang Pribadi dan PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi.

### **5.1.2 Pengujian Statistik**

Uji *goodness of fit* dilakukan dengan melihat nilai koefisien determinasi  $R^2$  yaitu sebesar 0,986532. Berarti 98,65 persen variasi perubahan penerimaan PPh Orang Pribadi mampu dijelaskan oleh variabel-variabel penjelas dalam model. Sedangkan sisanya sebesar 1,35 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model.

Melalui uji  $t$  (satu arah) diketahui bahwa secara individual seluruh variabel independen berpengaruh sangat signifikan terhadap variabel dependen pada derajat  $\alpha = 1$  persen ( $t$  tabel = 2,074). Pengujian variabel secara keseluruhan dilakukan dengan membandingkan  $F$ -statistik dengan  $F$ -tabel. Hasil estimasi didapatkan nilai  $F$ -statistik sebesar 309,2838 yang lebih besar daripada  $F$ -tabel (1%, 9, 40) = 2,89. Hal ini berarti tidak dapat menolak hipotesis nol, yaitu jumlah wajib pajak orang pribadi yang membayar PPh Orang Pribadi dan PDRB mampu menjelaskan variabel penerimaan PPh Orang Pribadi.

### **5.1.3 Uji Ekonometrika**

#### **5.1.3.1 Uji Multikolinearitas**

Multikolinearitas adalah suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel independen dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel independen lainnya. Akibat adanya multikolinearitas ini akan sangat sulit untuk memisahkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Firmansyah, 2001). Indikasi adanya multikolinearitas adalah nilai  $R^2$  yang dihasilkan dari suatu estimasi model empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat. Pada Tabel 5.1 dapat diketahui bahwa nilai  $R^2$  sangat tinggi = 0,986532 dan semua variabel penjelas sangat signifikan pada tingkat 1 persen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa di dalam model (3.5) tidak terdapat multikolinearitas.

#### **5.1.3.2 Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedastisitas berarti bahwa variasi residual tidak sama untuk semua pengamatan. Hal ini bertentangan dengan salah satu asumsi dasar regresi linier, yaitu variasi residual sama untuk semua pengamatan (homokedastisitas). Apabila asumsi ini dilanggar, maka estimasi koefisien akan tidak bias tetapi variasi estimasi koefisiennya tidak minimal atau tidak akurat lagi (Firmansyah, 2001).

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam model digunakan *White Test*. Uji ini dilakukan dengan meregres residual kuadrat ( $U_i^2$ ) dengan variabel bebas, variabel bebas kuadrat, dan perkalian variabel bebas. Dapatkan nilai  $R^2$  untuk menghitung  $\chi^2$ , dimana  $\chi^2 = n \cdot R^2$ . Apabila  $\chi^2$  –hitung <  $\chi^2$  –tabel, maka hipotesis alternatif adanya heteroskedastisitas dalam model ditolak.

Berdasarkan hasil pengolahan *Eviews* 4.1 diketahui bahwa  $R^2$  dalam *White Test* sebesar 0,437506 (Lampiran 2), maka  $\chi^2$  –hitung = 21,000288 sedangkan  $\chi^2$  –tabel = 76,1539. Karena  $\chi^2$  –hitung <  $\chi^2$  –tabel maka disimpulkan hipotesis alternatif adanya heteroskedastisitas dalam model (3.5) ditolak.

### 5.1.3.3 Uji Autokorelasi

Penaksiran model regresi linier mengandung asumsi bahwa tidak terdapat autokorelasi atau korelasi serial diantara *disturbance term*-nya. Pengujian autokorelasi dalam model estimasi ini dengan menggunakan *Durbin Watson test*, yaitu melihat nilai  $d$  hitung model regresi. Apabila hipotesis nol ( $H_0$ ) adalah tidak ada serial autokorelasi baik positif maupun negatif, maka jika:

- $d < d_L$  : menolak  $H_0$
- $d > 4 - d_L$  : menolak  $H_0$
- $d_U < d < 4 - d_U$  : tidak menolak  $H_0$
- $d_L \leq d \leq d_U$  : pengujian tidak meyakinkan
- $4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$  : pengujian tidak meyakinkan

Dalam model regresi diketahui bahwa  $d$ -hitung = 1,638103 (dengan  $N = 48$ ;  $k = 9$ ;  $d_L = 1,156$ ;  $d_U = 1,986$ ;  $4 - d_U = 2,014$ ;  $4 - d_L = 2,844$ ) terletak pada daerah keraguan  $d_L \leq d \leq d_U$  sehingga pengujian tidak meyakinkan. Apabila ditemukan kondisi seperti ini, Gujarati (2003) menyarankan untuk melakukan tes lain.

Tes lain yang dimaksud adalah *Breusch-Godfrey Test (BG Test)*, yaitu dengan meregres variabel pengganggu  $u_t$  dengan menggunakan *autoregressive model* orde  $p$ . Secara manual, jika  $(n-p) \cdot R^2$  atau  $\chi^2$  hitung lebih besar dari  $\chi^2$  tabel, maka menolak  $H_0$  yang menyatakan tidak ada korelasi dalam model. Dari program *Eviews 4.1* diketahui bahwa  $R^2 = 0,019085$  (Lampiran 3). Dengan mencoba orde pertama residual, didapatkan  $\chi^2$  hitung = 0,896995, lebih kecil dari  $\chi^2$  tabel = 63,6907. Kesimpulannya: dengan uji BG diketahui di dalam model (3.5) tidak terdapat autokorelasi.

#### **5.1.3.4 Uji Normalitas**

Penerapan OLS untuk regresi linier klasik diasumsikan bahwa distribusi probabilitas dari gangguan  $u_t$  memiliki nilai rata-rata yang diharapkan sama dengan nol, tidak berkorelasi, dan mempunyai varian yang konstan. Dalam model empiris ini dilakukan uji Jarque-Bera atau *J-B test*. Uji ini membandingkan antara J-B hitung dengan  $\chi^2$  tabel. Apabila nilai J-B hitung  $>$  nilai  $\chi^2$  tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual  $u_t$  berdistribusi normal ditolak. Apabila nilai J-B hitung  $<$

nilai  $\chi^2$  tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual  $u_t$  berdistribusi normal tidak dapat ditolak.

Uji J-B dengan menggunakan program *Eviews* 4.1 (Lampiran 4) menghasilkan nilai J-B hitung = 0,612383 sementara itu nilai  $\chi^2$  tabel = 63,6907. Karena nilai J-B hitung < nilai  $\chi^2$  tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual  $u_t$  berdistribusi normal tidak dapat ditolak.

#### 5.1.4 Ringkasan Hasil Pengujian

Hasil estimasi model empiris menunjukkan bahwa model regresi *LSDV* lolos dari berbagai uji sebagaimana terlihat dalam Tabel 5.2 berikut ini.

**Tabel 5.2**  
**Ringkasan Hasil Pengujian**

No.	Jenis Pengujian	Kesimpulan
1.	Teoritis	Semua tanda koefisien variabel bebasnya positif (sesuai dengan yang diharapkan).
2.	Statistik	Semua variabel bebasnya signifikan pada level 1 persen (lolos uji <i>t</i> dan <i>F</i> ).
3.	Ekonometrika: - Multikolinearitas - Heterokedastisitas - Autokorelasi - Normalitas	Lolos, karena telah lolos uji <i>t</i> dan <i>F</i> . Lolos dengan uji <i>White</i> Lolos dengan uji Breusch-Godfrey Lolos dengan uji Jargue-Bera

#### 5.2 Interpretasi Model

Untuk keperluan interpretasi model (3.5) maka hasil regresi sebagaimana dalam Tabel 5.1 dapat dituliskan kembali sebagai berikut:

$$LPhOP = -19,96187 + 4,916561Dum_1 + 7,713657Dum_2 + 1,095941Dum_3 + 3,768156Dum_4 + 2,576687Dum_6 + 2,835267Dum_7 + 2,464114Dum_8 + 1,422425LWPOP + 1,041910LPDRB.....(5.1)$$

Dari koefisien regresi parsial variabel WPOP sebesar 9.071,742 dapat dijelaskan bahwa dengan asumsi *ceteris paribus* peningkatan 1 persen jumlah wajib pajak orang pribadi yang membayar PPh Orang Pribadi akan meningkatkan penerimaan PPh Orang Pribadi sebesar 1,42 persen. Sedangkan peningkatan 1 persen PDRB mengakibatkan penerimaan PPh Orang Pribadi naik sebesar 1,04 persen.

Dari koefisien regresi parsial variabel *dummy* dapat dijelaskan sebagai berikut (dengan menjaga semua faktor lain konstan):

1. Terdapat perbedaan penerimaan PPh Orang Pribadi antara lapangan usaha pertanian dengan lapangan usaha perdagangan, hotel, dan restoran dengan nilai intersep untuk lapangan usaha perdagangan, hotel, dan restoran = -19,96187 sedangkan untuk lapangan usaha pertanian = -15,045309 (= -19,96187 + 4,916561).
2. Terdapat perbedaan penerimaan PPh Orang Pribadi antara lapangan usaha pertambangan dan penggalian dengan lapangan usaha perdagangan, hotel, dan restoran dengan nilai intersep untuk lapangan usaha pertambangan dan penggalian = -12,248213 (= -19,96187 + 7,713657).

3. Terdapat perbedaan penerimaan PPh Orang Pribadi antara lapangan usaha industri pengolahan dengan lapangan usaha perdagangan, hotel, dan restoran dengan nilai intersep untuk lapangan usaha industri pengolahan =  $-18,865929$  ( $=-19,96187 + 1,095941$ ).
4. Terdapat perbedaan penerimaan PPh Orang Pribadi antara lapangan usaha bangunan dengan lapangan usaha perdagangan, hotel, dan restoran dengan nilai intersep untuk lapangan usaha bangunan =  $-16,193714$  ( $=-19,96187 + 3,768156$ ).
5. Terdapat perbedaan penerimaan PPh Orang Pribadi antara lapangan usaha pengangkutan dan komunikasi dengan lapangan usaha perdagangan, hotel, dan restoran dengan nilai intersep untuk lapangan usaha pengangkutan dan komunikasi =  $-17,385183$  ( $=-19,96187 + 2,576687$ ).
6. Terdapat perbedaan penerimaan PPh Orang Pribadi antara lapangan usaha keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan dengan lapangan usaha perdagangan, hotel, dan restoran dengan nilai intersep untuk lapangan usaha keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan =  $-17,126603$  ( $=-19,96187 + 2,835267$ ).
7. Terdapat perbedaan penerimaan PPh Orang Pribadi antara lapangan usaha jasa-jasa dengan lapangan usaha perdagangan, hotel, dan restoran dengan nilai intersep untuk lapangan jasa-jasa =  $-17,497756$  ( $=-19,96187 + 2,464114$ ).

### **5.3 Analisis Deskriptif**

Analisis ini bertujuan untuk melengkapi analisis regresi yang mengkaji hubungan antara penerimaan PPh Orang Pribadi dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya, yaitu wajib pajak orang pribadi dan PDRB.

### **5.3.1 Penerimaan PPh Orang Pribadi**

#### **5.3.1.1 Per Kantor Pelayanan Pajak**

Administrasi pengumpulan PPh Orang Pribadi di Kota Semarang dilakukan oleh empat Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yaitu:

- a) KPP Semarang Barat dengan wilayah kerja enam kecamatan: Mijen, Gunungpati, Semarang Utara, Semarang Barat, Tugu, dan Ngaliyan.
- b) KPP Semarang Timur dengan wilayah kerja empat kecamatan: Pedurungan, Genuk, Gayamsari, dan Semarang Timur.
- c) KPP Semarang Selatan dengan wilayah kerja lima kecamatan: Banyumanik, Gajah Mungkur, Semarang Selatan, dan Candisari.
- d) KPP Semarang Tengah dengan wilayah kerja satu kecamatan: Semarang Tengah.

Adapun perkembangan penerimaan PPh Orang Pribadi di masing-masing KPP selama tahun 1999-2004 dapat dilihat pada Tabel 5.3.

*Tabel 5.3*

**Perkembangan Penerimaan PPh Orang Pribadi  
Kota Semarang Tahun 1999-2004  
(Dalam Milyar Rupiah)**

No.	KPP	Tahun						Rata-rata Pertumbuhan per Tahun (%)
		1999	2000	2001	2002	2003	2004	
1	Semarang Barat	2,199	2,904	3,913	7,835	11,263	15,280	118,97
2	Semarang Timur	1,929	2,277	3,726	5,935	9,044	14,704	132,45
3	Semarang Selatan	6,468	9,095	9,476	16,778	24,512	35,600	90,08
4	Semarang Tengah	2,595	3,400	3,830	5,332	5,948	8,321	44,13
<b>Jumlah</b>		<b>13,191</b>	<b>17,676</b>	<b>20,945</b>	<b>35,880</b>	<b>50,767</b>	<b>73,905</b>	<b>92,05</b>

*Sumber: Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jateng I*

Pada Tabel 5.3 terlihat bahwa jumlah penerimaan PPh Orang Pribadi telah naik dari Rp 13,19 milyar dalam tahun 1999 menjadi Rp 73,91 milyar dalam tahun 2004.

Pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 92,05%. Sementara itu, pertumbuhan rata-rata per tahun tertinggi dicapai oleh KPP Semarang Timur sebesar 132,5% dan terendah adalah KPP Semarang Tengah sebesar 44,1%. Secara umum penerimaan PPh Orang Pribadi di setiap KPP mengalami peningkatan tiap tahunnya baik secara nominal maupun persentasenya. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan pemungutan PPh Orang Pribadi telah berjalan efektif di Kota Semarang.

### **5.3.1.2 Per Lapangan usaha**

Lapangan usaha menunjukkan ruang lingkup kegiatan perekonomian di suatu wilayah. Masing-masing lapangan usaha mempunyai karakteristik yang berbeda. Jumlah lapangan usaha dalam masyarakat sebagaimana yang tercatat dalam Biro Pusat Statistik adalah sembilan lapangan usaha. Dalam penelitian ini satu lapangan usaha yang tidak diamati – lapangan usaha listrik, gas, dan air minum – karena tidak

ada penerimaan PPh Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Orang Pribadi dari lapangan usaha ini.

Dalam kaitannya dengan penerimaan PPh Orang Pribadi, lapangan usaha jasa-jasa memberikan kontribusi tertinggi selama tahun 1999-2004. Pada tahun 1999 penerimaan PPh Orang Pribadi dari lapangan usaha ini hanya sebesar Rp 8,80 milyar telah naik menjadi Rp 61,11 milyar dalam tahun 2004 atau rata-rata per tahun tumbuh sebesar 118,89%. Pertumbuhan penerimaan PPh Orang Pribadi yang tinggi baik nominal maupun persentasenya di lapangan usaha ini tidaklah mengherankan mengingat pembayar pajaknya adalah mereka yang berstatus sebagai karyawan di instansi pemerintah maupun swasta. Untuk pembayar pajak dari golongan ini telah dipotong PPh Orang Pribadi langsung dari bendaharawan atau pemberi kerja atas penghasilan yang diterimanya. Sedangkan untuk pembayar pajak golongan lainnya, mereka melakukan pembayaran PPh Orang Pribadinya sendiri tanpa melalui pemotongan pihak lain.

Yang menarik untuk dicermati adalah penerimaan PPh Orang Pribadi dari lapangan usaha perdagangan, hotel, dan restoran. Lapangan usaha ini merupakan basis perekonomian Kota Semarang. Secara nominal peningkatan penerimaan PPh Orang Pribadi dari lapangan usaha ini selama tahun 1999-2004 lebih tinggi dari lapangan usaha lainnya (kecuali lapangan usaha jasa-jasa) sebesar Rp 3,22 milyar pada tahun 1999 dan sebesar Rp 8,97 milyar di tahun 2004. Namun rata-rata pertumbuhan per tahunnya hanya 35,71% di bawah rata-rata pertumbuhan per tahun dari lapangan

usaha bangunan, pengangkutan dan komunikasi, dan keuangan. Sebagai contoh penerimaan PPh Orang Pribadi pada lapangan usaha pengangkutan dan komunikasi. Meskipun selama tahun 1999-2004 penerimaan PPh Orang Pribadi dari lapangan usaha ini hanya berkisar Rp 250 juta hingga Rp 1,3 milyar namun rata-rata pertumbuhan per tahunnya mencapai 68,57%. Fenomena ini menunjukkan bahwa penerimaan PPh Orang Pribadi dari lapangan usaha perdagangan, hotel, dan restoran belum optimal.

Perkembangan penerimaan PPh Orang Pribadi per lapangan usaha selama tahun 1999-2004 selengkapnya terlihat pada Tabel 5.4. berikut ini.

**Tabel 5.4**  
**Perkembangan Penerimaan PPh Orang Pribadi Kota Semarang**  
**Berdasarkan Lapangan usaha**  
**Tahun 1999-2004**  
**(Dalam Milyar Rupiah)**

No.	Lapangan usaha	Tahun						Rata-rata Pertumbuhan per Tahun (%)
		1999	2000	2001	2002	2003	2004	
1	Pertanian	0,03	0,04	0,03	0,03	0,06	0,04	6,66
2	Pertambangan & Penggalian	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,00
3	Industri Pengolahan	0,44	0,60	0,47	0,59	0,80	0,92	21,82
4	Bangunan	0,01	0,02	0,01	0,01	0,04	0,05	80,00
5	Perdagangan, Hotel, & Restoran	3,22	3,57	4,11	4,81	8,76	8,97	35,71
6	Pengangkutan & Komunikasi	0,28	0,10	0,10	0,14	1,05	1,24	68,57
7	Keuangan, Persewaan, & Jasa Perush.	0,41	0,39	0,48	0,88	1,17	1,56	56,10
8	Jasa-jasa	8,80	12,97	15,75	29,40	38,86	61,11	118,89
<b>Jumlah</b>		<b>13,19</b>	<b>17,68</b>	<b>20,94</b>	<b>35,88</b>	<b>50,77</b>	<b>73,91</b>	<b>92,06</b>

*Sumber: Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jateng I*

### **5.3.3 Wajib Pajak Orang Pribadi**

Jumlah wajib pajak orang pribadi merupakan faktor penentu dalam penerimaan PPh Orang Pribadi untuk Kota Semarang. Dalam penelitian ini jumlah wajib pajak orang pribadi yang diamati dibatasi pada jumlah wajib pajak orang pribadi yang membayar PPh Orang Pribadi karena berdasarkan fenomena jumlah wajib pajak orang pribadi yang besar tidak selalu menghasilkan tambahan penerimaan PPh Orang Pribadi yang besar pula. Disamping itu, pembatasan pada jumlah wajib pajak orang pribadi yang membayar PPh Orang Pribadi akan menghasilkan analisis yang lebih tajam.

Hasil empiris membuktikan bahwa peningkatan wajib pajak orang pribadi yang membayar PPh Orang Pribadi sebesar 1 persen akan meningkatkan penerimaan PPh Orang Pribadi sebesar 1,42 persen. Dengan kata lain penerimaan PPh Orang Pribadi relatif elastis terhadap perubahan jumlah wajib pajak orang pribadi yang membayar PPh Orang Pribadi. Hasil ini memperkuat temuan Delis dan Handoko (1996) bahwa laju pertumbuhan pajak dipengaruhi oleh laju pertumbuhan basis pajak (dalam hal ini jumlah wajib pajak).

Pada Tabel 5.5 disajikan laju pertumbuhan wajib pajak orang pribadi yang membayar PPh Orang Pribadi dan Penerimaan PPh Orang Pribadi Kota Semarang tahun 1999-2004. Seperti terlihat dalam Tabel 5.5 di atas jumlah wajib pajak orang pribadi yang membayar PPh Orang Pribadi telah naik dari 7.202 pada tahun 1999

menjadi 13.587 pada tahun 2004. Angka ini menunjukkan pertumbuhan rata-rata per tahun sekitar 18%. Sementara itu penerimaan PPh Orang Pribadi telah naik dari Rp 13,19 milyar dalam tahun 1999 menjadi Rp 73,91 milyar dalam tahun 2004. Rata-rata pertumbuhan per tahun sekitar 92%.

Apabila ditinjau dari rata-rata penerimaan PPh Orang Pribadi per wajib pajak orang pribadi yang membayar PPh OP, jumlahnya telah naik dari Rp 1,8 juta dalam tahun 1999 menjadi Rp 5,4 juta dalam tahun 2004. Rata-rata pertumbuhan per

**Tabel 5.5**  
**Laju Pertumbuhan**  
**Penerimaan PPh OP dan WP OP Yang Membayar PPh OP Kota Semarang**  
**Tahun 1999-2004**

Tahun	PPh OP		WP OP		Penerimaan PPh OP per WP OP	
	(Rp)	Laju Pertumbuhan (%)	(Orang)	Laju Pertumbuhan (%)	(Rp)	Laju Pertumbuhan (%)
1999	13.190.360.394	-	7.202	-	1.831.486	-
2000	17.676.094.202	34,01	7.219	0,23	2.448.552	33,70
2001	20.944.930.249	18,49	7.941	10,01	2.637.568	22,60
2002	35.880.427.667	71,30	9.436	18,80	3.802.504	44,17
2003	50.767.799.555	41,49	11.139	18,04	4.557.662	19,86
2004	73.905.957.427	45,58	13.587	21,98	5.439.461	19,35

*Sumber: Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jateng I*

tahunnya adalah 40%. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan rata-rata penerimaan PPh Orang Pribadi per wajib pajak orang pribadi sebesar 40% tersebut hanya 18% yang disebabkan oleh pertumbuhan wajib pajak orang pribadi.

Sementara itu, laju pertumbuhan penerimaan PPh Orang Pribadi per wajib pajak orang pribadi yang membayar PPh Orang Pribadi cenderung menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2000 pertumbuhan penerimaan PPh Orang Pribadi per wajib pajak orang pribadi yang membayar PPh Orang Pribadi sebesar 33,70% namun di tahun 2004 turun tajam menjadi 19,35%. Ada beberapa kemungkinan penyebabnya, yaitu:

1. Pendapatan atau kesadaran wajib pajak orang pribadi Kota Semarang mengalami penurunan.

2. Upaya penggalan penerimaan PPh Orang Pribadi Kota Semarang belum efektif. Apabila dikaitkan dengan jumlah wajib pajak orang pribadi Kota Semarang yang terdaftar, maka persentase jumlah wajib pajak orang pribadi yang membayar PPh Orang Pribadi selalu menurun tiap tahunnya. Pada tahun 1999 persentase jumlah wajib pajak orang pribadi yang membayar PPh Orang Pribadi dibandingkan yang terdaftar adalah 47,19%, pada tahun 2004 menurun menjadi 38,64% (lihat Tabel 5.6).

**Tabel 5.6**  
**Perbandingan Antara Wajib Orang Pribadi Yang Terdaftar Dengan Yang**  
**Membayar PPh Orang Pribadi Kota Semarang**  
**Tahun 1999-2004**

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi		Persentase
	Terdaftar	Pembayar PPh OP	

1999	15.263	7.202	47,19
2000	17.117	7.219	42,17
2001	19.780	7.941	40,15
2002	22.981	9.436	41,06
2003	28.585	11.139	38,97
2004	35.161	13.587	38,64

Sumber: Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jateng I

Rendahnya persentase jumlah wajib pajak orang pribadi yang membayar PPh Orang Pribadi terhadap wajib pajak orang pribadi mengindikasikan rendahnya kesadaran wajib pajak orang pribadi dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Terlebih lagi dikaitkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Semarang yang berpotensi menjadi wajib pajak menunjukkan penurunan kesadaran wajib pajak semakin kuat sebagaimana terlihat pada Tabel 5.7 berikut ini.

**Tabel 5.7**

Potensi Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Kota Semarang

Tahun 1999-2004 (Orang)

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Potensi Wajib Pajak Orang Pribadi</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi</b>	<b>Selisih</b>
1999	1.290.159	90.311	15.263	75.048
2000	1.309.667	91.677	17.117	74.560
2001	1.322.320	92.562	19.780	72.782
2002	1.350.005	94.500	22.981	71.519
2003	1.378.193	96.474	28.585	67.889
2004	1.389.421	97.259	35.161	62.098

Pada Tabel 5.7 terlihat bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi Kota Semarang yang terdaftar masih sangat kecil dibandingkan potensinya. Pada tahun 1999 jumlah wajib pajak orang pribadi Kota Semarang 15.263 orang atau sekitar 17% dari potensinya, naik menjadi 35.161 (36%) pada tahun 2004. Perhitungan potensi wajib pajak orang pribadi tersebut dengan asumsi (Gunadi, 2007):

1. Jumlah 1 keluarga terdiri dari 5 orang termasuk pembantu;
2. Jumlah keluarga miskin dan yang berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar 25%;
3. Jumlah keluarga yang bekerja di sektor informal sebesar 40%.

Dari informasi potensi wajib pajak orang pribadi menunjukkan bahwa potensi penerimaan PPh Orang Pribadi Kota Semarang di masa depan masih sangat besar.

#### **5.3.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

PDRB menunjukkan kegiatan perekonomian yang ada di suatu wilayah. PDRB dapat juga diartikan sebagai akumulasi pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi di suatu wilayah.

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel PDRB signifikan terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi. Peningkatan 1 persen PDRB akan mengakibatkan peningkatan penerimaan PPh Orang Pribadi sebesar 1,04%. Kecilnya angka koefisien ini menunjukkan bahwa peranan PPh Orang Pribadi masih sangat rendah dibandingkan

dengan pajak-pajak lainnya. Bukti ini juga didukung dengan rasio penerimaan PPh Orang Pribadi terhadap PDRB sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.7 berikut ini.

**Tabel 5.8**  
**Penerimaan PPh Orang Pribadi dan PDRB**  
**Kota Semarang**  
**Tahun 1999-2004**

Tahun	PPh OP		PDRB		Rasio (%)
	(Jutaan Rp)	Laju Pertumbuhan (%)	(Jutaan Rp)	Laju Pertumbuhan (%)	
1999	13.190	-	11.074.038	-	0,12
2000	17.676	34,01	12.734.893	15,00	0,14
2001	20.945	18,49	14.907.515	17,06	0,14
2002	35.880	71,30	16.925.531	13,54	0,21
2003	50.768	41,49	18.805.483	11,11	0,27
2004	73.906	45,58	20.566.853	9,37	0,36

Pada Tabel 5.8 tampak bahwa rasio penerimaan PPh Orang Pribadi masih sangat rendah meskipun rasio tersebut cenderung naik setiap tahunnya. Rata-rata pertumbuhan penerimaan PPh Orang Pribadi per tahun selama tahun 1999-2007 hanya berkisar 0,05%.

### **5.3.5 Hubungan Antara Penerimaan PPh Orang Pribadi dengan Wajib Pajak Orang Pribadi dan PDRB**

Dari hasil regresi menunjukkan bahwa semua koefisien variabel signifikan baik secara individu maupun keseluruhan. Artinya, Wajib Pajak Orang Pribadi dan PDRB sangat berpengaruh terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi. Keterkaitan hubungan tersebut secara jelas nampak pada Tabel 5.9.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil estimasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh Orang Pribadi dengan menggunakan model LSDV dihasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan antara lapangan usaha dalam penerimaan PPh Orang Pribadi Kota Semarang.
2. Lapangan usaha perdagangan, hotel, dan restoran merupakan lapangan usaha andalan Kota Semarang dalam penerimaan PPh Orang Pribadi.
3. Peningkatan 1% wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak akan meningkatkan penerimaan PPh Orang Pribadi sebesar 1,42%.
4. Peningkatan 1% PDRB akan meningkatkan penerimaan PPh Orang Pribadi sebesar 1,04%.
5. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi Kota Semarang.
6. Model estimasi penerimaan PPh Orang Pribadi melalui LSDV layak dipakai sebagai model empiris karena lolos dari berbagai uji dan semua variabel bebasnya signifikan pada derajat 1%.

## **6.2 Saran**

1. Upaya penggalan penerimaan PPh Orang Pribadi perlu ditingkatkan. Upaya tersebut dapat dimulai dengan menjaring penduduk Kota Semarang yang penghasilannya di atas PTKP tetapi belum ber-NPWP melalui kerjasama antara pemerintah Kota Semarang dengan administratur pajak.
2. Meningkatkan kesadaran membayar PPh Orang Pribadi bagi penduduk Kota Semarang yang sudah ber-NPWP melalui penyuluhan maupun publikasi umum.
3. Meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak orang pribadi
4. Bagi pemerintah Kota Semarang, perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

## **6.3 Limitasi**

1. Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa wajib pajak orang pribadi semata-mata memperoleh penghasilan dari kegiatan perekonomian di Kota Semarang. Untuk perhitungan yang lebih akurat, diharapkan ada penelitian lebih lanjut yang dapat memisahkan basis pajak ini.
2. Penelitian ini memfokuskan pada wajib pajak orang pribadi. Agar memperoleh hasil yang komprehensif perlu adanya penelitian terhadap wajib pajak badan.
3. Model LSDV hanya salah satu model regresi data panel. Perlu dilakukan penelitian serupa dengan menggunakan model lainnya seperti *Random Effects Model* (REM) atau *Error Components Model* (ECM).

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang *Pajak Penghasilan*, PT Mitra Info, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2000 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, CV Duta Nusindo, Semarang.
- Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah, 2006, *Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2005*, Semarang.
- \_\_\_\_\_, *Semarang Dalam Angka Tahun 1999 – 2000*, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Semarang Dalam Angka (Tahun 2001 – 2004)*, Semarang.
- Boediono, 1997, *Ekonomi Makro*, Edisi Keempat, BPFE, Yogyakarta.
- Brotowidjoyo, Mukayat D., 1988, *Penulisan Karangan Ilmiah*, CV Akademika Pressindo, Jakarta.
- Dornbusch, Rudiger dan Stanley Fischer, 1996, *Makroekonomi*, Edisi Keempat, Alih Bahasa: J.A. Mulyadi, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Firmansyah, 2002, *Pendekatan Ekonometri Dalam Penelitian Ekonomi*, Makalah Pelatihan Metodologi Penelitian, Statistik, dan Ekonometrika, Tidak Dipublikasikan.
- Gemmel, Norman, 1994, *Perpajakan dan Pembangunan*, dalam Norman Gemmell (ed.), *Ilmu Ekonomi Pembangunan*, Penerjemah: Nirwono, PT Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Gujarati, Damodar, 1995, *Ekonometrika Dasar*, Alih Bahasa: Sumarno Zain, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Gunadi, 2007, *Menyoal Potensi Ekstensifikasi*, Berita Pajak No. 1590, Jakarta.
- Harjowiryono, Marwanto, 2000, *Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak*, Berita Pajak No. 1429, Jakarta.

- Hidayat, Tahmid, 2001, *Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Sebagai Usaha Peningkatan Penerimaan*, Berita Pajak No. 1442, Jakarta.
- Hyman, David N., 1999, *Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy, sixth edition*, The Dryden Press, Harcourt Brace College Publishers, USA.
- Insukindro, 1994, *Penerimaan Pajak*, PT Djambatan, Bandung.
- Ismail, Tjip, 2006, *Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Memperkuat Kapasitas Fiskal Daerah*, Makalah Seminar Nasional Dalam Rangka Dies Natalis FE Universitas Diponegoro Ke-46, Semarang.
- Jhingan, M.L., 2002, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Penerjemah: D. Guritno, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Loehr, William, George Guess, and Jorge Martinez, 1998, *Fiscal Decentralization Case Studies: Methodological Observations*, World Bank Report.
- Mangkoesebroto, Guritno, 1994, *Ekonomi Publik*, Edisi Ketiga, BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Musgrave, Richard A. dan Peggy B. Musgrave, 1993, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Kelima, Alih Bahasa: Alfonsius Sirait, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Miyasto, Edy Yusuf AG, dan Sugiyanto, 1990, *Masalah-masalah Perpajakan di Indonesia*, MEB, Edisi Khusus Lustrum, Maret 1990, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Poernomo, Hadi, 2002, *Strategi & Prakarsa Regulasi Perpajakan Nasional Dalam Menopang Optimalisasi Penerimaan Negara*, Berita Pajak No. 1465, Jakarta.
- Rosen, Harvey S., 1999, *Public Finance*, Irwin/McGraw-Hill, Singapore.
- Samuelson, Paul A. & William D. Nordhaus, 1999, *Mikroekonomi*, Alih Bahasa: Harris Munandar, Burhan Wirasubrata, dan Eko Wydiatmoko, Penerbit Erlangga, Jakarta.

- Sidik, Machfud, 2000, *Strategi Perpajakan Nasional Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi*, Berita Pajak No. 1427, Jakarta.
- Sobel, Russel S., and Randall G. Holcombe, *Measuring The Growth and Variability of Tax Bases Over The Business Cycle*, National Tax Journal, Vol. XLIX No. 4.
- Stiglitz, Joseph E., 2000, *Economics of The Public Sector*, Third Edition W.W. Norton and Company Inc., 500 fifth Avenue, New York.
- Suparmoko, M., 1994, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Keempat, BPFE, Yogyakarta.
- Susilo, Y. Sri, 2005, *Desentralisasi Fiskal & Kinerja Perekonomian*, Jurnal Ekonomi & Bisnis FE Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta.
- Todaro, M.P., 1994, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Alih Bahasa: Burhanuddin Abdullah dan Harris Munandar, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Yurzal, 2002, *Analisis Perilaku Wajib Pajak Berdasarkan Pendekatan Wajib Pajak*, Berita Pajak No. 1463, Jakarta.
- Zandjani, Tubagus Chairul Amachi, 1992, *Perpajakan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.







